

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI MESIR DALAM Mendukung
PALESTINA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA
DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN MURSI
(TAHUN 2012-2013)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hubungan
Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama *International
Security and Conflict***

Disusun Oleh:

Wiwik Handayani

105120413111004



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKKAN LUAR NEGERI MESIR DALAM MENDUKUNG
PALESTINA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI BAWAH
KEPEMIMPINAN PRESIDEN MURSI (TAHUN 2012-2013)**

SKRIPSI

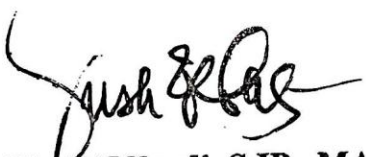
Disusun Oleh :

WIWIK HANDAYANI

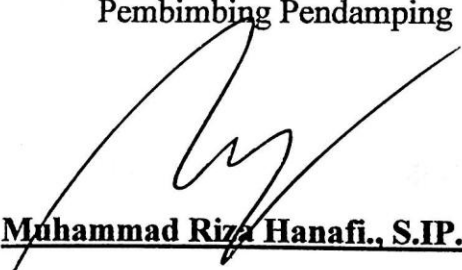
NIM 105120413111004

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

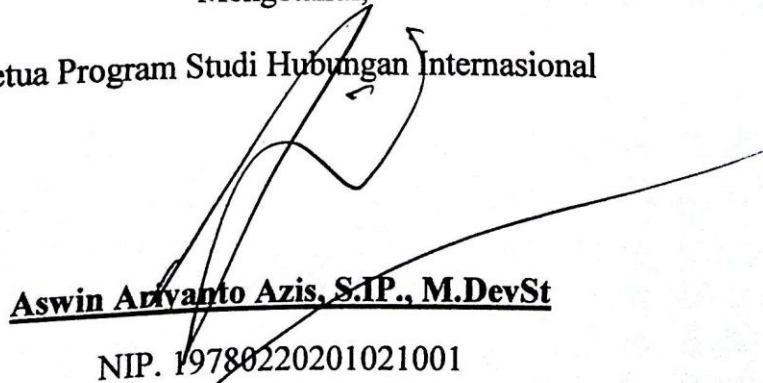

Yusli Effendi, S.IP., MA.
NIP. 197804232009121001

Pembimbing Pendamping


Muhammad Riza Hanafi., S.IP., MIA
NIK. 2011028002071001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201021001

PERNYATAAN

Nama: Wiwik Handayani

NIM: 105120413111004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN LUAR NEGERI MESIR DALAM Mendukung PALESTINA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN MURSI (TAHUN 2012-2013)** adalah murni hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 14 Juni 2017



Wiwik Handayani

NIM. 105120413111004

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Wiwik Handayani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 20 Desember 1992
Alamat : RT 01 RW 01, Dusun Krajan, Desa Gondosari,
Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
Agama : Islam
Telepon / HP : 087859496493
Email : wiwikhandaya@gmail.com

Pendidikan Formal

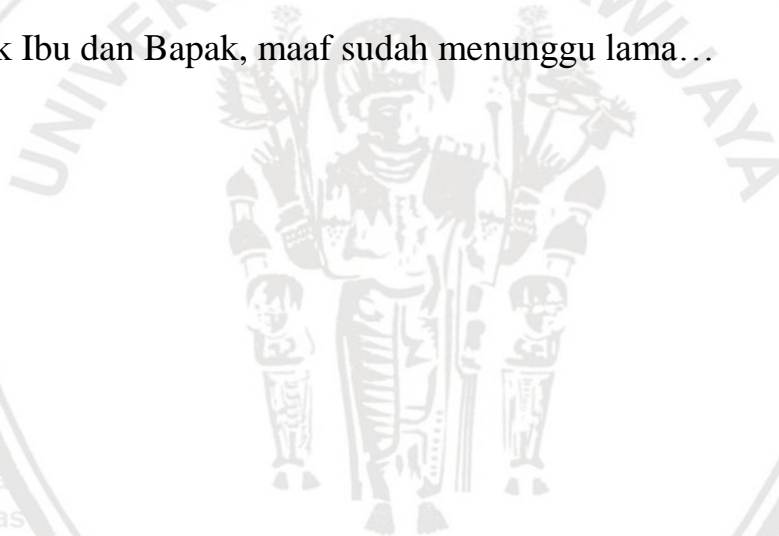
1997-1998 : TK Utama Putra Punung
1998-2004 : SDN 1 Gondosari
2004-2007 : SMPN 2 Punung
2007-2010 : SMKN 2 Pacitan
2010-2017 : Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal

2011 : Kursus Bahasa perancis (Debutant 1) FIB Universitas Brawijaya
2012-2016 : Kesenian Teater Ruang Karakter

HALAMAN PERSEMBAHAN

Banyak tempat yang bersedia menerima kebaikan,
tapi rumah*,
Tidak mengiba pada kesempurnaan,
Tidak menuntut kasih yang luput
Bilamana seisi dunia terpejam,
Kecuali kalian yang senantiasa pendar dalam doa-doa kebaikan
Untuk Ibu dan Bapak, maaf sudah menunggu lama...



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gejolak politik Mesir yang terjadi pada awal tahun 2011 yang merupakan rangkaian dari *Arab Spring*. Fenomena politik tersebut menjadi momentum penting dalam penelitian penulis yang memiliki keterkaitan dengan fenomena-fenomena lainnya yang lebih mengerucut dalam tulisan ini.

Mursi sebagai Presiden baru di Mesir setelah Mubarak turun dari jabatan dengan paksa akibat gejolak politik Mesir 25 Januari 2011, dinilai memiliki karakteristik dan pandangan politik yang sangat berbeda dari Mubarak. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Di era Mubarak, Mesir lebih memilih kebijakan-kebijakan yang dianggap aman dan sesuai koridor perjanjian damai dengan Israel dan Amerika, Camp David. Perubahan orientasi kebijakan luar negeri Mesir tersebut menjadi sebuah kasus yang menarik setelah kurun waktu 30 tahun dibawah kepemimpinan Mubarak posisi Mesir dalam konflik Israel-Palestina adalah status quo. Keputusan Mursi untuk berpihak kepada Palestina tidak lepas dari faktor kedekatan ideologi yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan *adaptive foreign policy* yang digagas oleh Rosenau, perubahan orientasi kebijakan luar negeri Mesir dalam konflik Israel-Palestina tersebut merupakan bentuk dari adaptasi atas perubahahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya baik secara internal maupun eksternal. Lebih lanjut penulis memetakan tiga faktor yang mendasari perubahan arah kebijakan luar negeri Mesir tersebut, yaitu eksternal, internal, dan kepemimpinan/ individu.

Kata Kunci: kebijakan luar negeri, Mursi, Arab Spring, Mesir, Konflik Israel-Palestina, Ikhwanul Muslimin

ABSTRACT

This research is motivated by the Egyptian political turmoil that occurred in early 2011 which was a sequence of Arab Spring. This political phenomenon became an important momentum in this research which relevant to the other specific phenomena in this paper.

Mursi as a new President of Egypt after Mubarak was toppled by force due to political turmoil in Egypt who is considered as having different characteristic and political views from previous predecessor. This is proven by the changing orientation of Egypt's foreign policy in Israeli-Palestinian conflict. In the era of Mubarak, Egypt's foreign policy tend to choose peaceful agendas according to the corridor of a peace agreement with Israel and America, Camp David. The changing of Egyptian foreign policy orientation as a sample of interesting case, after 30 years under Mubarak's leadership, Egypt's position in the Israeli-Palestinian conflict is status quo. Mursi's decision to be on the Palestinians side cannot be separated from the ideological proximity of his Muslimin Brotherhood background.

According to adaptive foreign policy by Rosenau, the changing of Egypt's foreign policy orientation in Israeli-Palestinian conflict is the consequence of adaptation from the internal or external environmental transformation. Furthermore, the researcher categorized three major factor as internal, external, and leadership aspects that caused the changing of Egypt's foreign policy.

Keywords: foreign policy, Mursi, Arab Spring, Egypt, Israeli-Palestinian conflict, Muslimin Brotherhood

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis yang begitu besar ditujukan kepada Allah SWT.

Terimakasih, tanpa cahayaMu karya ini hanya sebuah imajinasi. Cahaya-cahaya tersebut tidak serta merta turun tanpa perantara. Ada sederetan manusia-manusia Mulia di bawah ini yang dengan rendah hati mau menjadi perantara cahaya Tuhan bagi penulis.

Bapak Yusli Effendi, S.IP., MA, dosen pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik, terimakasih banyak, Pak. Banyak sekali hal-hal baik dari, Bapak yang bisa saya kenang. Bapak M. Riza Hanafi., S.IP., MIA, terimakasih atas dukungan, doa, dan kerendahan hati, Bapak selama proses bimbingan. Ibu Asih Purwanti., S.IP., M.IP dan Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari., S.sos., M.SI, selaku Ketua Majelis Penguji dan Sekretaris Majelis Penguji, terimakasih untuk kebesaran hati atas kekurangan-kekurangan skripsi saya. Untuk seluruh dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya, terimakasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga kebaikan senantiasa melingkupi Bapak dan Ibu dosen sekalian. Seluruh keluarga besar Hubungan Internasional FISIP UB, senantiasa akan menjadi salah satu kenangan terbaik bagi penulis.

Teman-teman Ruang Karakter, penulis akan merindukan proses bersama kalian. Semoga suatu saat masih dipertemukan dalam panggung pertunjukan. Di hati kecil penulis, masih ada mimpi ‘monolog’ yang belum tercapai. Untuk Mbak Dias, Hemas, Amel, Tery, terimakasih. Meski satu persatu kalian pergi pada hiruk pikuk masing-masing, ada satu hal baik yang senantiasa erat di hati, ‘pertemanan’.

Eva Aprilia Winanta, terimakasih sudah membagi keceriaan di akhir penulis tinggal di Kota Malang. Semoga mimpi-mimpimu yang kau semai dengan kerja keras membumbung tinggi mencapai jari-jemari Tuhan. Kemudian tak lupa juga untuk Gaduts, Uluk, Otong, Gombloh, Coco, Milo, Momoi kalian obat stress, penyejuk jiwa, cepat beranak pinak, ya, jangan sakit-sakitan.

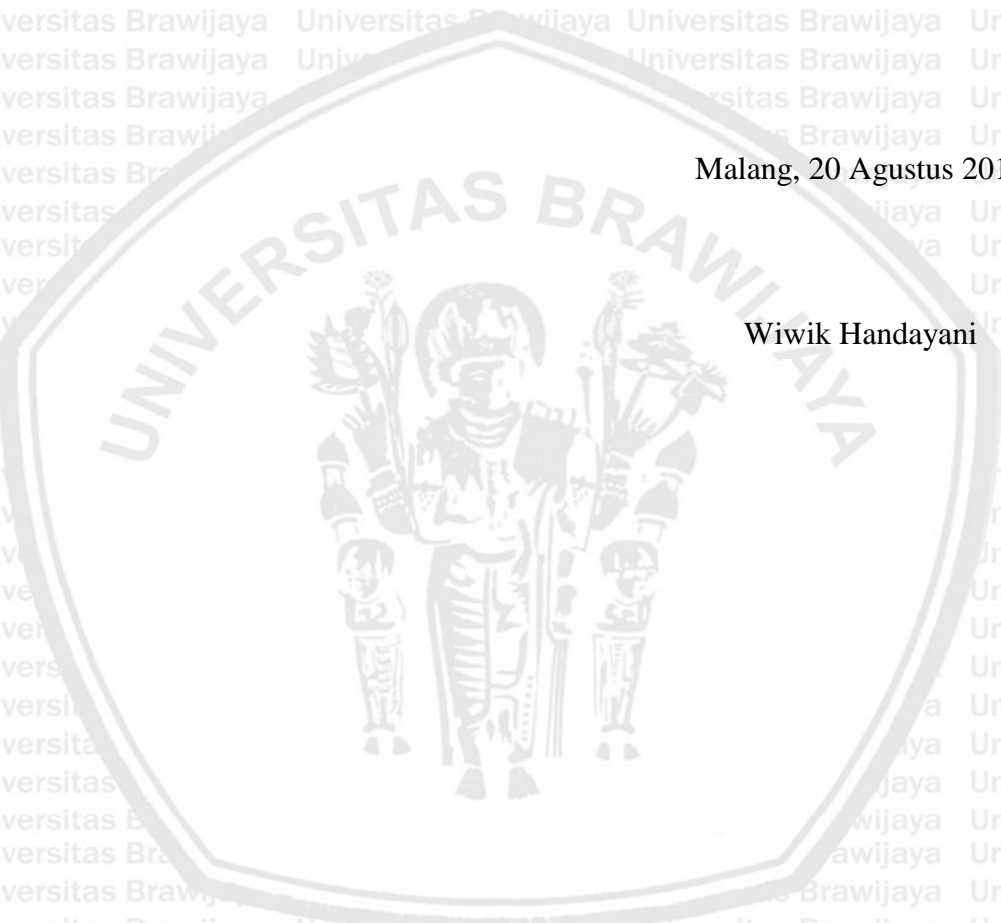
Ipung Miftakhul Aziz, terimakasih kebersamaannya. Sudah selesai ini skripsinya. Ayo lekas menjemput mimpi-mimpi kemarin yang tertambat di kata

'lulus'. Rinjani dan belantara lainnya di depan mata. Ibu, Bapak, Andi... Aku pulang. Semoga bisa membahagiakan kalian.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penelitian ini bukan karya tanpa cela, terimakasih yang menyempatkan waktu untuk membaca atau sekedar melihat tulisan ini. Semoga kesalahan yang ditemu di dalamnya, membawa pembaca pada karya yang lebih baik dari ini.

Malang, 20 Agustus 2017

Wiwik Handayani



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Biodata Penulis	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Singkatan	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II Tinjauan Pustaka.....	14
2.1 Studi Terdahulu.....	14
2.2 Peringkat Analisis	20
2.3 Kerangka Teori.....	21
2.3.1 Teori Kebijakan Luar Negeri	21
2.3.2 Model Adaptif	32
2.4 Kerangka Operasional.....	35
2.5 Hipotesis.....	40
BAB III Metode Penelitian.....	41
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	41
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Teknik Analisa Data	43
3.5 Sistematika Penulisan	43
BAB IV Gambaran Umum.....	46
4.1 Penggulingan Mubarak dan Terpilihnya Mursi	46
4.1.1 Arab Spring dan Gejolak Politik Mesir 2011	46
4.1.2 Berakhirnya Rezim Mubarak	58
4.1.3 Mesir <i>Vacuum of Power</i> dan diambil alih oleh SCAF (DewanMiliter).....	62
4.1.4 Terpilihnya Mursi Sebagai Presiden baru	65

4.2 Mesir dalam Konflik Israel Palestina.....	67
4.2.1 Sikap Mesir di Masa Kepemimpinan Mubarak	70
4.2.2 Sikap Mesir di Masa Kepemimpinan Mursi.....	71
BAB V Pembahasan.....	75
5.1 <i>External Change</i>	76
5.1.1 Mesir dalam Kawasan Timur Tengah dan Struktur Sistem Internasional	76
5.1.2 Pola Aliansi	80
a. Regional	80
b. Internasional.....	82
5.2 <i>Structural Change</i>	86
5.2.1 <i>Societal Source</i>	86
a. <i>Economic Development</i>	86
b. <i>Moods of Opinion</i>	87
5.2.2 <i>Governmental Source</i>	88
5.3 <i>Leadership</i>	90
BAB VI Kesimpulan	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri..... 33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik GDP Mesir Tahun 2000-2010..... 51
Gambar 4.2 Tabel Indikator Sosial Mesir..... 57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Empat Tipe Kondisi Adaptasi..... 38





DAFTAR SINGKATAN

AS
FJP
GDP
IT
NDP
PBB
PLO
SCAF

Amerika Serikat
Freedom Justice Party
Gross Domestic Product
Industrial Technology
National Democratic Party
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Palestine Liberation Organization's
Supreme Council of the Armed Forces



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2011 terjadi gejolak politik di Mesir yang bertujuan untuk menurunkan rezim Mubarak. Rakyat melakukan aksi unjuk rasa karena didorong oleh rasa kecewa terhadap pola kepemimpinan Mubarak yang menduduki Mesir sebagai presiden selama hampir 30 tahun. Ada tiga faktor utama yang mendasari kekecewaan masyarakat mesir. *Pertama*, sistem sosial ekonomi yang tidak mencerminkan keadilan. Terjadi kesenjangan yang tinggi antara kelompok elit dengan mayoritas masyarakat di Mesir. *Kedua*, adanya pengekangan terhadap kelompok kelas menengah yang telah terdidik secara intelektual dan pemahaman yang signifikan mengenai proses demokratisasi. Akses sosial, ekonomi, dan informasi kelompok tersebut mendapat batasan dari rezim mubarak. *Ketiga*, adanya kaum agamawan yang selama ini dikooptasi oleh kekuasaan.¹

Gaya kepemimpinan Mubarak yang memiliki kecenderungan besar terhadap Amerika dan Israel tidak bisa dilepaskan dari kesepakatan perjanjian damai Camp David yang telah disepakati sejak tahun 1979. Perjanjian damai tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi yang mengikat bagi pihak-pihak

¹ David Akhmad Ricardo, *Revolusi Mesir Revolusi Rakyat* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2011), hal. 44-45

yang terlibat di dalamnya yaitu Mesir, Israel, dan Amerika. Contohnya, sebagai kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut mengharuskan Mesir untuk melakukan ekspor gas alam ke Israel dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Israel.²

Selain itu juga ada keharusan yang mengikat bagi Mesir untuk menerapkan zona demiliterisasi kawasan Semenanjung Sinai yang merupakan bagian dari otoritas wilayah Mesir dan berbatasan langsung dengan kawasan Israel. Hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel dan Mesir dengan Amerika Serikat juga harus selalu berjalan dengan harmonis meski terjadi pasang surut atau dimanika politik yang terjadi.³

Beberapa hal yang harus disepakati dalam perjanjian damai tersebut juga memberikan kemudahan akses ekonomi politik Mesir kepada pihak Amerika dan Israel. Seperti halnya bantuan ekonomi Amerika kepada Mesir. Adanya bantuan tersebut yang mendasari pemerintahan Mubarak untuk cenderung menjaga stabilitas dari perjanjian Camp David. Selain bantuan ekonomi yang diterima, bentuk keuntungan dalam segi politik dan militer juga diperoleh Mesir selaku pihak mediator dalam perjanjian Camp David.⁴

² Michael Sharnof, *Post Mubarak Egyptian Attitudes Towards Israel*, (Foreign Policy Research Institute, 2011) hal.1

³ Memo AIPAC, *Post-Mubarak Egypt Must Maintain Peace Treaty with Israel*, (Cooperation with United States: 2011) hal.1

⁴ Hanna Ebeid, *Paying for Peace: American Aid to Egypt, 30 Years after Camp David* dalam *The Legacy of Camp David: 1997-2009*, (The Middle East Institute, Washington DC, 2009), hal.27

Sejak tahun 1948 hingga 2011, tercatat bantuan untuk bidang militer dari AS yang diterima oleh Mesir adalah sebesar \$71,6 milyar.⁵ Untuk bantuan ekonomi tercatat sebesar \$815 juta. Total bantuan yang diterima Mesir dari AS selama pemerintahan Mubarak adalah \$2,1 milyar.⁶ Besarnya bantuan ekonomi dan militer yang diterima oleh Mesir tersebut menjadi salah satu pertimbangan besar bagi kepemimpinan Mubarak untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Israel dan mempertahankan perjanjian Camp David.

Setelah gejolak politik Mesir yang terjadi tahun 2011 dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, Presiden Mubarak resmi mengundurkan diri melalui pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Omar Suleiman dengan memberikan pengumuman bahwa pemerintahan di Mesir sementara akan diambil alih oleh Militer.⁷ Pernyataan pengunduran diri Mubarak tersebut disambut antusias oleh warga Mesir dengan melakukan sorak sorai secara beramai-ramai dan sholat Jumat berjamaah.

Setelah pengunduran diri Mubarak yang dianggap sebagai kesuksesan atas rangkaian aksi yang dilakukan rakyat Mesir 2011, mengakibatkan kondisi politik di negara tersebut menjadi sorotan internasional. Beberapa pemimpin dari negara lain seperti Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron, dan beberapa tokoh lainnya seperti Angela Merkel dan Nicholas Sarkozy turut

⁵ Jeremy M. Sharp, *Egypt Background and U.S Relations*, (Congressional Research Service 2013), hal. 9

⁶ *Ibid* hal.9

⁷ David Akhmad ricardo, *Revolusi Mesir Revolusi rakyat*, (Arus Timur, Jakarta, 2011). hal 90

memberikan suara agar Mesir segera bergerak menuju pemerintahan yang demokratis.⁸

Turunnya Mubarak dari jabatan, membawa Mesir kepada sebuah keadaan yang disebut *vacuum of power*. Sehingga Militer mengambil alih sementara atas kontrol dan pemerintahan Mesir. Dewan Militer Mesir/ SCAF (*Supreme Council of the Armed Forces*) yang dipimpin oleh Mohammed Husein Tantawi memiliki tantangan terkait stabilitas dan keamanan dalam negeri Mesir setelah peristiwa 2011 yang masih cenderung konfliktual menuntut untuk segera diselesaikan. Selain aspek tersebut, keadaan politik yang masih diwarnai dengan adanya demonstrasi atas berbagai aspirasi dari bermacam-macam kelompok yang dilakukan oleh rakyat Mesir setelah dibukanya kebebasan pers dan berpendapat, menjadi sebuah diskursus tersendiri atas perubahan hak berpendapat rakyat Mesir yang selama ini cenderung dikekang selama rezim Mubarak. Kepemimpinan SCAF dalam tubuh pemerintahan Mesir memiliki beberapa agenda jangka pendek yang menuntut untuk segera dilaksanakan dan selesai. Seperti halnya penyelesaian terhadap isu politik dan keamanan serta persiapan menuju pemilu secara demokratis dan aman bagi rakyat Mesir.⁹

Prestasi demokratisasi Mesir yang pertama adalah diselenggarakannya pemilu presiden pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 13 kandidat multipartai. Dari sejumlah kandidat calon presiden yang terdaftar, Muhammad

⁸ *Ibid*, hal.92

⁹ Daniel Brumberg dan Hesham Sallam, *The Politics of Security Sector Reform in Egypt* (Special Report No. 318, United States Institute of Peace, Oktober 2012) hal. 12

Mursi dari *Freedom Justice Party* yang merupakan sayap politik dari kelompok kepentingan Ikhwanul Muslimin berhasil memenangkan pemilihan. Mursi adalah presiden pertama yang mengakhiri stigma bahwa kepemimpinan Mesir selalu identik dengan militer.¹⁰

Naiknya Mursi sebagai Presiden Mesir yang terpilih secara demokratis memberi harapan besar bagi rakyat yang menginginkan perubahan gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan baru yang dianggap positif. Pengembalian stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan dalam negeri setelah serangkaian peristiwa politik, menjadi sebuah tugas bagi Mursi yang harus segera diselesaikan. Beberapa langkah yang diambil Mursi dalam upaya mengembalikan stabilitas nasional tertuang dalam kebijakan-kebijakan yang dibentuknya, seperti kebijakan politik dan kebijakan terkait sosial ekonomi.

Kebijakan politik Mursi meliputi pengaktifan kembali parlemen yang sempat dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, pembebasan 572 tahanan militer yang terlibat dalam aksi demonstrasi 2011, pemberhentian jabatan Jaksa Agung yang disusul pembentukan konstitusi baru tentang jaminan posisi Presiden agar tidak mudah digulingkan oleh Jaksa Agung. Sedangkan **Kebijakan Sosial Ekonomi** antara lain adalah: optimalisasi Terusan Suez untuk pariwisata dan ekonomi, peminjaman dana IMF sebesar 4,8 miliar dollar, pengurangan subsidi energi sebesar 22% (pengurangan anggaran tersebut dialokasikan untuk peminjaman pendanaan /modal usaha bagi rakyat miskin), jaminan kesejahteraan sosial bagi PNS, pensiunan, prajurit dan perwira angkatan bersenjata sebesar 15%,

¹⁰ Tanpa nama penulis, *Presidential Election in Egypt*, (Final Report May-June 2012, The Carter Center, Atlanta) hal. 2

pemfokusan program 100 hari Presiden Mursi kepada sektor keamanan, pangan, pasokan energi, kebersihan jalan, dan permasalahan kemacetan lalu lintas.¹¹

Peristiwa politik 2011 menyisakan berbagai permasalahan sosial dan stabilitas baik politik dan keamanan dalam negeri. Selain pada isu-isu tentang stabilitas nasional, transisi kepemimpinan Mesir dari Mubarak ke Mursi setelah peristiwa 2011, memberikan sejumlah pertanyaan besar terkait orientasi kebijakan luar negeri Mesir terhadap konflik Israel-Palestina. Tipikal kepemimpinan antara Mubarak dan Mursi serta aktor-aktor yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi kebijakan keduanya merupakan pembahasan utama yang nantinya akan menjadi sebuah perbandingan mengenai adanya perubahan baik secara struktural maupun dari aspek-aspek kepemimpinan serta faktor-faktor eksternal yang tidak luput dari kajian penulis pada bab-bab selanjutnya.

Beberapa agenda kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan sebelumnya, misalnya mengenai perjanjian damai Camp David dengan Israel, adalah salah satu unsur yang dapat menjadi tolok ukur perbandingan antara gaya kepemimpinan Mubarak dan Mursi. Perjanjian damai Camp David menjadi aspek dilema bagi Mursi dalam menentukan kebijakan luar negerinya terkait respon terhadap Israel-Palestina.¹² Mursi menghendaki adanya perubahan orientasi politik terkait konflik Israel-Palestina. Langkah-langkah

¹¹ Linda Nur Ramly dan RR. Tery Irenewati, *Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013)*, (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial September 2015, Vol.12 No.2)

¹² Maria Caleste Baranda, *Post-Mubarak Egypt: Redefining its Role in The New Middle Eastern Balance of Powe*, (INEGMA Special Report no. 14 April 2011), hal. 11

yang diambil oleh Mursi menunjukkan bahwa orientasi politik luar negeri Mesir mulai menunjukkan keberpihakannya kepada pihak Palestina. Hal tersebut didukung dengan peningkatan hubungan Mesir dengan kelompok Hamas.¹³

Meskipun masa jabatan Mursi sebagai Presiden Mesir jauh lebih singkat dibandingkan Mubarak, tetapi secara garis besar, Mubarak dan Mursi memiliki perbedaan karakteristik dalam merespon konflik Israel-Palestina. Hal tersebut menjadi unik dan dianggap menarik bagi penulis untuk diangkat menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Di masa Mubarak, Mesir lebih memilih status quo dan bersikap pasif dalam konflik tersebut. Mubarak cenderung menghindari kebijakan-kebijakan yang memiliki konsekuensi yang dapat menimbulkan konfrontasi baik dengan pihak Israel maupun palestina. Status quo menjadi pilihan Mubarak yang dianggap paling rasional untuk menjaga stabilitas hubungan Mesir dengan AS. Mubarak lebih memilih kebijakan-kebijakan yang dianggap aman terkait konflik Israel-Palestina supaya hubungan bilateral Mesir dengan AS tidak mengalami penurunan.¹⁴

Sedangkan Mursi sebagai pemimpin baru Mesir yang notabeneanya adalah sebagai oposisi besar Mubarak memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat konflik Israel-Palestina. Mursi memiliki kecenderungan untuk melakukan keberpihakan kepada palestina. Hal tersebut didukung dengan

¹³ Azzurra Meringolo, *From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at The Service of Domestic Policy*, (Insight Egypt, No. 8, Maret 2015) hal. 3

¹⁴ Gregory Aftandilian. *Egypt's New Regime and The Future of The U.S-Egyptian Strategic Relationship*, (Strategic Studies Institute and U.S Army War College Press, April 2013) .Hal. 6

beberapa tindakan yang diambilnya. Misalnya pada bulan November 2012 Israel melancarkan serangan ke Gaza, kejadian tersebut direpson oleh Mursi dengan pemanggilan duta besar Mesir di Israel dan Palestina untuk diajak berkonsultasi dengan Liga Arab. Dari kejadian tersebut, Mursi menganggap Israel sebagai pihak yang bersalah.¹⁵ Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Mursi dalam sebuah tayangan televisi Mesir bahwa serangan tersebut merupakan hal yang tidak dapat diterima (*unacceptable*) dan dapat memicu ketidakstabilan dalam kawasan.¹⁶

Eskalasi konflik di jalur Gaza tersebut dinilai sebagai situasi yang dilematis bagi Mursi terkait Hamas sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ideologi dengan FJP serta konsekuensi perjanjian damai yang mengikat dengan Israel. Tetapi pada kenyataannya Mursi mengambil sikap tegas yang mengejutkan dengan menyatakan dukungannya kepada Palestina dan menyebut pihak Israel sebagai “Vampir” yang telah menyebabkan banyaknya korban dari warga sipil Palestina. Lebih lanjut Mursi mengeluarkan pernyataan di sebuah tayangan televisi sebagai berikut: *“The Egyptian people, the Egyptian leadership, Egyptian government and all of Egypt are standing with all its resources to stop this assault, to prevent the killing and bloodshed of the Palestinians, Israelis must recognize that we do not accept this aggression.”*

(“Masyarakat Mesir, Pemimpin Mesir, Pemerintah Mesir dan mereka semua

¹⁵ Qian Xuewen, *The January Revolution and The Future of Egypt*, (Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol.6, No.2, 2012), hal. 49

¹⁶ Edward Yeranian, *Egypt's Morsi: Israeli Airstrikes on Gaza 'Unacceptable'*, (VOA News 15 November 2012 [daring]) tersedia dalam:

<https://www.voanews.com/a/egypts-president-morsi-says-israeli-airstrikes-on-gaza-unacceptable/1547019.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2017)

berupaya dengan segenap kekuatan untuk menghentikan serangan ini, Israel seharusnya menyadari bahwa kita tidak akan menerima serangan tersebut.”¹⁷.

Setelah rangkaian argumen yang menunjukkan keberpihakan Mursi kepada Palestina tersebut, tindakan selanjutnya adalah dibukanya perbatasan Mesir yang berdekatan dengan lokasi konflik, penyediaan fasilitas kesehatan untuk warga sipil Palestina, termasuk penyediaan helikopter militer untuk angkutan warga Palestina yang menjadi korban serangan Gaza.¹⁸

Selain sikap Mursi yang menunjukkan keberpihakannya dalam kenaikan konflik Israel-Palestina di Gaza tersebut, bentuk dukungan Mesir kepada Palestina juga ditandai dengan keputusan Mursi untuk membuka Jalur Rafah pada bulan Juli 2012. Keputusan tersebut disambut baik oleh Hamas dan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas yang melibatkan perpindahan seperti perdagangan dan aktivitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut.¹⁹

Mesir di bawah kepemimpinan Mursi yang menunjukkan perubahan sikap dari status quo era Mubarak menjadi berpihak kepada palestina tidak lepas dari nilai-nilai urgensi yang ingin dicapai oleh Mursi. Mursi ingin memberikan perubahan dalam hal *region's political balance* dengan

¹⁷ David. D Kirkpatrick dan Mayy El Sheikh, *With Gaza Attacks, Egypt's President Balances Hamas Against Israeli Peace*. (NY Times 15 November 2012 [daring]) tersedia dalam: <http://www.nytimes.com/2012/11/16/world/middleeast/israels-gaza-strikes-test-egyptian-leader.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2017.

¹⁸ Ibid. hal 1

¹⁹ Dan Bradley Swale, *Discord in The Desert: Egypt's Sinai Peninsula in the aftermath of the Arab Spring*. A Thesis of Defence and Strategic Studies. (Manawatu, New Zeland :Massey University,. 2015).Hal.71

melakukan pola tindakan politik regional yang lebih menonjol dibandingkan era Mubarak, salah satunya melalui sikap tegasnya terhadap konflik Israel-Palestina. Mursi memiliki arah untuk memperkuat *bargaining position* Mesir di level internasional dengan cara memperkuat politik kawasan yang selama era Mubarak mengalami stagnansi. Konflik Israel-Palestina adalah isu strategis yang dapat dijadikan jalan bagi Mesir untuk melakukan perubahan yang hendak dicapai melalui pendekatan ideologi yang melatarbelakangi Mursi. Wujud dukungan kepada Palestina tersebut memiliki implikasi secara tidak langsung kepada Iran untuk menciptakan *sense of solidarity* karena kesamaan kedekatan ideologi (kedekatan dengan Hamas). Hal tersebut dikuatkan dengan meningkatnya hubungan Mesir dengan Iran yang pada masa Mubarak tidak harmonis.²⁰

Perubahan orientasi politik khususnya dalam konflik Israel- Palestina tersebut disebabkan oleh faktor-faktor baik internal seperti *societal sources* dan *governmental sources*, eksternal seperti pola aliansi dan *great structure power*, serta faktor individu seperti *values, talent, experience*, dan *personality of leader* yang mempengaruhinya. Mursi yang berasal dari kalangan Ikhwanul Muslimin juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan sikap politik dan kebijakan luar negeri Mesir yang menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina.

²⁰ Garetta Nada, *Iran-Egypt: Prospect of a New Alliance?* [daring] (United States Institute Of Peace, 11 Januari 2013) tersedia dalam: <http://iranprimer.usip.org/discussion/2013/jan/11/iran-egypt-prospects-new-alliance> diakses pada: 01-08-2017

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “Mengapa terjadi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Mesir terkait konflik Israel-Palesina di bawah kepemimpinan Mursi tahun 2012-2013?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor baik internal atau eksternal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Mesir terkait dukungan terhadap Palestina dalam konflik Palestina-Israel di bawah kepemimpinan Mursi tahun 2012-2013.
2. Memberikan penjelasan mengenai orientasi kebijakan luar negeri Mesir tahun 2012-2013
3. Memberikan analisis perkembangan hubungan bilateral Mesir-israel di tahun 2012-2013

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademisi

1. Sebagai instrumen untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis dan komprehensif dalam melihat suatu permasalahan khususnya dalam menganalisa sebuah kebijakan luar negeri suatu Negara melalui sudut pandang yang luas.

2. Sebagai instrumen penambah bagi pengembangan keilmuan dalam studi Hubungan Internasional khususnya terkait dengan Mesir, kebijakan luar negeri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
3. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pencarian informasi terkait topik bahasan penelitian yang dilakukan penulis.

1.4.2 Bagi Praktisi

1. Sebagai instrumen untuk pemahaman secara detail dan komprehensif mengenai isu dan hal-hal terkait yang diangkat oleh penulis dalam karya ini.
2. Sebagai instrumen untuk mengasah serta menguji daya implementasi teori dan aplikasinya terhadap suatu permasalahan.
3. Sebagai instrumen pengkayaan kajian teoritis yang secara implementatif dikorelasikan terhadap analisis kasus yang diangkat peneliti, sehingga kedepannya ditujukan sebagai bahan rujukan/referensi untuk mengkaji kasus dengan tipe yang sama.
4. Sebagai instrumen studi pustaka bagi praktisi yang hendak melakukan pengkajian terhadap suatu kasus, baik dengan tipikal kasus yang sama maupun teori yang sama.
5. Sebagai instrumen yang cukup efektif untuk mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajari selama penulis menempuh studi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Brawijaya.

1.4.3 Bagi Masyarakat Umum

1. Membuka pandangan masyarakat mengenai Islam yang di korelasikan dengan ranah politik maupun hubungan antar negara.
2. Memberikan penjelasan mengenai krisis politik Mesir dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Mursi terkait konflik Israel-Palestina tahun 2012-2013.
3. Sebagai salah satu instrumen penambah wawasan yang memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin sebagai unit pengambil keputusan.
4. Sebagai salah satu instrumen penambah wawasan yang memberikan gambaran mengenai posisi Mesir secara politik baik dalam lingkup regional maupun internasional setelah terjadi gejolak politik 2011, dan adanya perubahan orientasi kebijakan luar negeri.
5. Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri Mesir yang dianalisa melalui sudut pandang makro dengan teori yang bersifat multilevel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Penulis merujuk pada dua studi terdahulu yang memaparkan tentang politik luar negeri Timur Tengah. Salah satu rujukan penulis jadikan sebagai acuan penelitian ini, memberikan penjelasan secara rasional dan sistematis mengenai politik luar negeri Timur Tengah. *The Foreign Policies of Middle East State* yang ditulis oleh Estehsami memberikan gambaran bahwa pada mulanya Timur Tengah merupakan sebuah peradaban yang independen kemudian menjadi bagian periferi karena penetrasi hegemoni barat dalam sistem internasional. Ada tiga hal penting yang menjadi faktor eksistensi intervensi Barat terhadap Timur Tengah yaitu, minyak, rute transit, dan Isrel. Agenda keamanan menjadi salah satu perhatian utama bagi negara dalam menentukan kebijakan karena intensitas konflik yang mendominasi wilayah tersebut. Kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah dibentuk langsung oleh pemimpin dalam melakukan negosiasi politik di dalam situasi konfliktual dan bersifat menekan, secara konseptual dipetakan menjadi tiga: *Domestic level, Regional systemic level, dan Global/International level.*¹

Beberapa studi seperti Galtung mencoba menjabarkan kondisi periferi yang dialami kawasan Timur Tengah:²

¹ Raymond Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami, *The Foreign Policies of Middle East States*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002), Chapter 1

² *Ibid.* hal.3-5

Pertama, dimulai pada era merkantilisme yang membawa pada fenomena imperialisme dan kemudian memiliki strategi klasik memecah-belah negara sehingga kekuatan negara-negara tersebut melemah. Dalam kondisi demikian rasionalitas negara pada saat itu adalah melakukan pencarian patronasi kepada negara yang memiliki *power* lebih besar.

Kedua, karakteristik *parallel incorporation* dalam ekonomi regional dalam sistem kapitalis global memberikan efek degradasi pada interdependensi ekonomi kawasan regional, yang kemudian cenderung bergeser pada pola dependensi klasik berupa kompetisi ekspor pada produk-produk mentah (contoh: kapas dan minyak) dan mengandalkan impor produk manufaktur dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar internal. Minyak adalah sebuah sumberdaya spesifik dan memiliki perbedaan dari produk mentah lainnya. Selain harga yang tinggi, sumber daya minyak hanya dimiliki oleh kawasan tertentu seperti Timur Tengah. Negara-negara yang memiliki sumber daya minyak akan mengandalkan pendapatan ekonomi negara secara mayoritas pada sektor tersebut. Pada kenyataannya arus perputaran petrodollar disisi lain membawa pada dependensi regional secara menyeluruh, terlebih ketika negara-negara pengeksport minyak melakukan pinjaman luar negeri. Dalam tipikal dependensi ekonomi tersebut, berarti fungsi utama dari politik dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan adalah jaminan atas keamanan arus pendapatan dari klien-klien pengimpor minyak. Karena pendapatan negara terbesar berasal dari *external resources* seperti bantuan luar negeri, pajak dari perdagangan internasional dan penjualan minyak, maka pendapatan seperti pajak domestic

bukan menjadi prioritas. Sehingga desain keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan adalah berdasar kepada *global power* dibandingkan opini domestik.

Ketiga, manipulation of interest dilakukan untuk mewujudkan imperialisme dalam dalam jangka panjang, negara *core* memiliki strategi dengan menciptakan *client elites* di negara subordinasi kelompok kelas dominan atau disebut juga dengan istilah komprador. Negara *core* dan kelas dominan memiliki ikatan ekonomi yang kuat karena loyalitas yang terjadi antara kedua belah pihak. Di sisi lain hal tersebut hanya mengakomodasi kepentingan segelintir pihak, akibatnya pembangunan ekonomi nasional berjalan lambat karena kesenjangan yang terjadi.

Keempat, kendati strategi *manipulation of interest* memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam menjamin keberlangsungan regional subordinasi, ketika terjadi ketidakcocokan dalam kepentingan, *core power* tidak segan untuk melakukan sebuah *punishment* yang bisa berupa penarikan bantuan, sanksi ekonomi, dan bentuk-bentuk sanksi lainnya. Sebagai cara klasik lainnya, sektor militer akan digunakan oleh *core power* ketika terjadi sebuah perlawanan nasional. Pola hubungan *core-periphery* yang terjadi di kawasan Timur Tengah banyak diartikan sebagai bentuk hubungan politik minyak.

Tulisan tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini karena adanya persamaan dari segi wilayah dan topik yang diangkat, yaitu Timur Tengah dan kebijakan luar negeri. Perbedaan dari tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah cakupan baik dari aspek waktu dan wilayah.

Dalam tulisan Hinnebusch dan Ehteshami memiliki rentang waktu yang besar, yaitu pada masa setelah Perang Dingin hingga awal abad 20. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya spesifik pada rentang waktu 2012 hingga 2013. Dari aspek wilayah, Hinnebusch dan Ehteshami membahas secara komprehensif tentang kebijakan luar negeri Timur Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan dalam penelitian penulis ini hanya difokuskan pada negara Mesir saja. Secara sederhana, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk spesifikasi dan pembaharuan terhadap sebagian kecil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hinnebusch dan Ehteshami.

Marijke Breuning dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, menjelaskan dengan baik mengenai aktor pembuat kebijakan beserta hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam membentuk sebuah kebijakan. Lebih mudahnya, pembuat kebijakan diidentikkan dengan sosok individu sebagai pelaku. Individu yang biasanya diartikan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara memiliki wewenang yang kuat dalam menentukan kebijakan baik dalam negeri atau luar negeri. Marijke Breuning mencoba untuk memberikan perspektif secara mikro mengenai sebuah kebijakan yang terbentuk ada proses yang terjadi yang melibatkan aktor pembuat kebijakan serta situasi politik dan lain-lain yang menyertai. Aktor pembuat kebijakan dalam perspektif Breuning adalah seorang (individu) yang melekat atau menjadi bagian dalam sebuah badan/ institusi pemerintah. Ada kalanya aspek personal dalam diri individu

sebagai sosok pengambil kebijakan memiliki kondisi pada titik “persimpangan” dengan organisasi pemerintahan. Kondisi “persimpangan” yang dimaksudkan adalah ketika idealisme seorang pembuat kebijakan berbenturan dengan kepentingan birokrasi dan banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, maka sebuah keputusan akan diambil sebagai titik tengah dari “persimpangan” dari kepentingan beberapa pihak tersebut.³

Dalam bukunya tersebut, Breuning juga mencoba untuk menggarisbawahi tentang peranan agen-agen kecil (*small group*) dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai penasehat dan pemberi masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pembuat kebijakan. Dari adanya beberapa *small group* dalam tubuh pemerintahan, tentu tidak lepas dari konsekuensi pola-pola interaksi yang bermacam-macam.⁴

Masyarakat akan memberikan pujian kepada sosok pemimpin ketika kebijakan yang dihasilkan dianggap memuaskan dan sukses, demikian sebaliknya apabila kebijakan dianggap gagal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat maka yang mendapat sorotan pertama kali adalah sosok pemimpin sebagai pembuat kebijakan.⁵

Memahami proses pembuatan kebijakan perlu adanya mempertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan baik secara internal atau eksternal. kondisi lingkungan domestik dan internasional

³ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hal.85

⁴ *Ibid.* Hal. 85

⁵ *Ibid.* Hal. 9

diasumsikan sebagai sekumpulan institusi. Institusi (lembaga) didefinisikan sebagai seperangkat sistem yang berisi aturan-aturan dan disepakati secara kolektif (baik secara prosedur maupun dalam tataran praktis), hal tersebut yang dipahami sebagai fenomena sosial atau *human creation*.⁶

Timur Tengah mengalami pergeseran fenomena sosial yang pada awalnya merupakan peradaban independen menjadi periferi karena dominasi barat. Penetrasi barat ke wilayah Timur Tengah dimotivasi oleh faktor seperti kedekatan geografis dan kepentingan luar biasa pada sektor energi minyak.⁷ Perubahan fenomena sosial tersebut, memberikan gambaran yang menarik terhadap pola pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara kawasan Timur Tengah.

Adapun korelasi penelitian Marijke Breuning dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai kesamaan topik kebijakan luar negeri. Breuning mencoba memberikan gambaran secara spesifik mengenai aktor-aktor pengambil kebijakan. Sedangkan penulis melalui penelitian ini mencoba untuk memahami dengan baik mengenai peran Mursi sebagai Presiden Mesir dalam membuat kebijakan. Penelitian Breuning membantu penulis untuk memetakan fenomena pengambilan kebijakan luar negeri Mesir oleh Mursi.

Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan memetakan lebih jauh pengaruh-pengaruh internal dan eksternal dalam pembentukan kebijakan luar negeri Mesir dalam konflik Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Presiden

⁶ *Ibid* hal.165

⁷ Ehteshami, *Op.Cit.*, hal 3

Mursi. Penggunaan kedua literatur diatas dikarenakan adanya kesamaan pendekatan dalam melihat proses pembuatan kebijakan luar negeri.

2.2. Peringkat Analisis

Penulisan ini menggunakan tingkat analisa multilevel yang mencakup individu, kelompok, dan sistem internasional. Dalam analisa individu, ilmuwan yang melakukan analisa hubungan internasional beranggapan bahwa fenomena hubungan internasional adalah konsekuensi dari perilaku individu-individu yang saling melakukan interaksi di dalamnya. Karenanya, diperlukan pemahaman pada sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan.⁸ Unit analisa ini digunakan penulis untuk memahami perilaku individu Mursi sebagai Presiden Mesir sebagai aktor pengambil kebijakan.

Dalam tingkat analisis kelompok memiliki asumsi dasar bahwa individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional dimaknai sebagai hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu melainkan kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro, dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk memahami hubungan internasional penting untuk mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat di

⁸ Mohtar Masoed. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 41

dalamnya.⁹ Unit analisa ini digunakan penulis sebagai instrument untuk memahami perilaku kelompok seperti birokrasi di Mesir yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri.

Pendukung analisa dalam tingkat analisa sistem internasional, berasumsi bahwa bangsa-bangsa di dunia ini dan interaksi di antara mereka merupakan suatu sistem. Struktur sistem itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya. Sistem sebagai lingkungan telah menentukan perilaku negara-bangsa. ¹⁰ Unit analisa ini digunakan penulis untuk melihat pola-pola interaksi Mesir dalam skala regional dan Internasional.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam hal ini, teori digunakan penulis sebagai alat bantu analisa dari studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri yang digagas oleh Rosenau. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut penjelasan yang dapat penulis sampaikan.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan

⁹ *Ibid.* Hal. 41

¹⁰ *Ibid.* hal. 41

nasional.¹¹ Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu negara pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu yang bersangkutan.¹²

Dengan demikian karakteristik kebijakan luar negeri suatu negara bisa berubah-ubah sesuai dengan visi misi pemimpin negara atau aktor pembuat kebijakan yang sedang menjabat pada waktu yang bersangkutan.

Rosenau mengartikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah perilaku adaptif, yang berusaha dijelaskan melalui sebuah analogi dari kehidupan organisme yang selalu melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan lingkungan/habitatnya. Baik organisme yang hidup sebagai *single cell*, individu, kelompok kecil, atau sekumpulan besar manusia, yang berusaha mempertahankan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang dipenuhi “drama”. Dapatkah organisme melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi? Dapatkah organisme tersebut mengambil benefit dan memanfaatkan perubahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya? Atau justru melebur lalu kemudian menghilang karena ketidakmampuannya melakukan adaptasi pada lingkungannya. Apabila organisme tersebut mampu survive dan menjadi “menonjol” di lingkungannya, maka apa yang dikorbankan oleh organisme tersebut untuk mencapai hal itu? Apakah dengan melakukan perubahan

¹¹ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Abardin, 1999), hal. 5

¹² Mohtar Masoed, *Op., Cit.* Hal. 184

radikal pada struktur internalnya, atau organisme tersebut melakukan penyesuaian dengan membaca tanda-tanda yang diberikan oleh lingkungan dan kemudian melakukan adaptasi secara *smooth*?¹³ Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dianggap Rosenau sebagai bagian yang sangat menarik karena bentuk-bentuk survive dari organisme terhadap perubahan lingkungannya bukan merupakan sesuatu yang *taken for granted* melainkan sesuatu yang diupayakan. Semua bentuk pertanyaan di atas dan drama yang menyertainya adalah “jiwa” dari studi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau.¹⁴

Rosenau menyatakan bahwa perubahan (*change*) merupakan dimensi sentral dari perspektif adaptatifnya. Apabila tidak ada perubahan, maka tidak perlu melakukan adaptasi.¹⁵ Sehingga untuk memudahkan dalam melakukan analisa adaptif kebijakan luar negeri, ada tiga tipe perubahan yang masing-masing dapat memberikan pengaruh kepada aspek-aspek yang bersifat *governmental* atau *non governmental* baik secara eksternal maupun internal. Berikut tipe-tipe perubahan yang dikemukakan oleh Rosenau dalam lingkup internal:¹⁶

Internal personnel change, perubahan yang terjadi pada identitas orang-orang yang menempati sektor pemerintahan atau non pemerintah dan memiliki peranan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam *internal personnel change* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu agar layak

¹³ James Rosenau. *Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model*. (Journal of Comparative Politics. Vol.2. No3. April, 1970), hal. 365

¹⁴ *Ibid* hal. 366

¹⁵ *Ibid*. hal. 372

¹⁶ *Ibid*. hal. 373

menempati perannya dalam menggantikan predesesornya. Bagaimanapun, perubahan dalam tipe ini memiliki limitasi terkait tujuan dan hal-hal yang bersifat mengatur dari lembaga yang ditempati itu sendiri, sehingga kemungkinan untuk memberikan perubahan pada sektor politik, ekonomi, dan sosial sangatlah kecil.

Internal political change, dalam hal ini perubahan tidak hanya terjadi pada personel pemerintahan atau institusi politik, melainkan pada adanya perubahan dalam aspek tuntutan, kapabilitas, serta batasan-batasan tertentu.

Internal socioeconomic, diartikan sebagai perubahan tuntutan, kapabilitas, batasan-batasan, dan hubungan antara peran kepemimpinan dalam institusi-institusi masyarakat selain dalam hal politik dan pemerintahan. Munculnya kelas-kelas sosial baru, industrialisasi, munculnya standar-standar baru mengenai kesejahteraan, intensifikasi *group conflicts*, peranan media massa, pendidikan, dan resesi ekonomi. Hal-hal tersebut diterjemahkan sebagai *socioeconomic trends* yang terjadi dalam masyarakat yang memberikan kontribusi bagi perubahan secara politik. Semakin besar level *socioeconomic change*, maka implikasi terhadap perubahan politik juga semakin besar pula.

Dalam lingkup eksternal juga sama, dipetakan secara garis besar menjadi tiga, yaitu:¹⁷

¹⁷ *Ibid.* hal 375

External personnel change, tidak jauh berbeda dengan internal, *external personnel change* mengacu pada pergeseran identitas personel yang menduduki peran kepemimpinan pemerintah dan non pemerintah dalam *salient environment*. Sedikit berbeda dengan level internal, *external personnel change* lebih membuka kemungkinan akan adanya implikasi terhadap perubahan eksternal dalam sektor politik dan ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak secara struktural.

External political change, dipahami sebagai perubahan dalam hal persyaratan, kemampuan, dan keterbatasan peran yang dimiliki pemerintah baik dalam lingkungan masyarakat internal, eksternal, dan organisasi internasional dalam *salient environment*. Ketika perubahan terjadi dalam masyarakat eksternal, hal tersebut serupa dengan *internal political change* dalam artian bahwa hal itu mengakibatkan pergeseran hubungan antar pejabat pemerintah sebagai warga negara tertentu, namun tidak dalam peran sosial dan institusi ekonomi secara internal. Biasanya, *external political change* terjadi ketika hubungan peran pemerintah dan politik antar masyarakat di luar negeri sedang mengalami perubahan.

Contoh atau ilustrasi mengenai *external political change* pada *salient environment* misalnya pembentukan aliansi baru, pemutusan hubungan diplomatik, akuisisi *new capabilities* (khususnya dalam hal nuklir) yang mengakibatkan pergeseran pola dominasi serta negara-negara yang harus mematuhiinya. Karena *external political change* yang terjadi pada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam *salient environment* dapat

memberikan konsekuensi berupa kebijakan baru terhadap masyarakat/negara yang melakukan adaptasi atau pembentukan hubungan baru dengan negara lain yang nantinya juga memiliki konsekuensi pada hal-hal yang bersifat adaptif.

External socioeconomic change, melibatkan perubahan dalam hal *requirements*, kapabilitas, dan batasan peran kepemimpinan dalam lembaga-lembaga nonpolitik dan organisasi internasional dalam *salient environment*.

External socioeconomic change dapat dipahami melalui gambaran seperti proses pembangunan ekonomi dan penurunan ekonomi di negara sekitar, upaya penurunan inflasi dan pergolakan revolusioner di negara sekitar, penemuan lokasi sumber daya alam baru oleh negara pesaing, penerimaan atau penolakan program pengendalian kelahiran oleh negara-negara padat penduduk, pembukaan atau penutupan jalur perdagangan, serta adanya modifikasi aturan kerja atau standar kesehatan oleh lembaga-lembaga internasional. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa *external socioeconomic change* berbeda dengan *internal socioeconomic change* karena perubahan dapat terjadi pada sektor eksternal dan internal.

Melalui tulisannya *Pre-theories and theories of foreign policy*, Rosenau mencoba menjelaskan fenomena kebijakan luar negeri melalui sebuah pendekatan makro. Analisa makro yang ditawarkan Rosenau menuntun penstudi yang menggunakan pemikirannya dalam menganalisa kebijakan luar negeri untuk membentuk elaborasi sumber-sumber sebagai seperangkat variabel yang telah diterjemahkan oleh Rosenau. Sumber-

sumber tersebut diklasifikasikan menjadi lima, antara lain: *individual*, *role*, *governmental*, *societal*, dan *systemic variables*.¹⁸

1. *Individual sources (values, talent, experience, dan personality of leaders)*.

- *values* mencakup nilai-nilai keyakinan yang dimiliki,
- *talent* mencakup bakat-bakat yang dimiliki,
- *experience* yang dimaksud adalah pengalaman-pengalaman individu,
- *personality of leaders* adalah kepribadian yang dimilikinya/karakter. Rosenau melihat bahwa setiap pembuat keputusan memiliki karakteristik yang unik (berbeda) dalam memutuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri.

Variabel individu meliputi nilai-nilai keyakinan, bakat, dan pengalaman-pengalaman yang kemudian menjadi faktor dalam membedakan pilihan-pilihan kebijakan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya. Pada level ini, pemimpin sebagai pembuat kebijakan luar negeri akan dipengaruhi oleh faktor alamiah individu yang memiliki kepribadian atas bentukan lingkungan tempat dia tumbuh, pendidikan yang diperoleh, latar belakang keluarga, keyakinan, dan bakat alami. Kalkulasi dan persepsi yang terbentuk dari seorang pemimpin merupakan akumulasi dari sisi internalnya sebagai individu.

¹⁸ James N. Rosenau. *The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Change*. Vol. 1. (London: Routledge, 2006), Hal. 173

2. *Role*, variabel ini diartikan sebagai perilaku eksternal pejabat/ pembuat kebijakan ketika berada dalam lingkungan tertentu (peran yang di tempati dalam konteks tertentu) akan memiliki kemungkinan untuk lepas dari karakteristik individu (mengesampingkan aspek-aspek personal). Sebagai contoh: perwakilan dari Amerika Serikat di forum PBB akan membela dan mempertahankan posisi Amerika Serikat di Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

3. *Governmental (political accountability, governmental structure)*. Variabel ini mengacu pada aspek-aspek struktur pemerintahan, yang akan memberikan konsekuensi berupa pembatasan atau kelonggaran terhadap pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang ditentukan oleh para aktor pembuat kebijakan.¹⁹ Variabel pemerintahan termasuk didalamnya memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.

- *Political accountability* merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai, serta tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal.

- *Governmental structure* diartikan sebagai struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi kurang efisien dalam hal anggaran negara, kegiatan-kegiatan demokrasi

¹⁹ *Ibid.*

membutuhkan anggaran yang besar, tetapi memiliki fleksibilitas

dalam kebijakan luar negeri karena terbuka tentang opini publik.

Berbeda dengan negara otoriter yang lebih efisien dalam hal mobilisasi masa, akan tetapi opini publik tidak memiliki cukup peran dalam pembentukan kebijakan luar negeri.²⁰

4. *Societal (economic development, cultural and history, social structure,*

moods of opinion), pada level ini Rosenau menjelaskan variabel-

variabel yang bersifat *nongovernmental* yang bersumber dari *society*

(masyarakat) yang mempengaruhi *external behaviour* dari pelaku

kebijakan. Beberapa *major value* dari variabel masyarakat yang

mempengaruhi konten kebijakan luar negeri misalnya, tingkat

persatuan nasional, ekonomi, kultur, struktur, sosial, dan opini publik.²¹

- Kebudayaan/kultur mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antar anggota masyarakat.

- Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan nasional negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain.

- Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat.

²⁰ Anak Agung Banyu P dan Yanyan Mochamad Y, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal.57

²¹ Rosenau. *Op.*, *Cit.* hal. 172-173

- Opini publik juga dapat menjadi faktor di mana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap kondisi eksternal.²²

5. *Systemic sources (size, geography, great power structure, alliances, technology)*²³

- *Size* dan *geography* merupakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai georgafis sebuah negara seperti luas wilayah, letak wilayah, lokasi. Hal-hal tersebut merupakan dimensi fisik sebuah negara.

- *Great power structure* diartikan sebagai struktur hubungan antara negara-negara besar yang memiliki power besar. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antar negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka.

- *Alliances* dipahami sebagai respon negara untuk membentuk kekuatan yang lebih besar dengan melakukan kerjasama negara lain untuk merespon isu keamanan.²⁴

Rosenau melihat *systemic sources* sebagai variabel *nonhuman* dari lingkungan masyarakat eksternal (internasional) atau kondisi yang berkaitan secara sistemik dengan lingkungan internasional yang mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan luar negeri *decision maker*.

²² Anak Agung Banyu P. *Op.*, *Cit.* Hal. 57

²³ Anak Agung Banyu P. *Op.*, *Cit.* Hal. 57

²⁴ Kennet Waltz dalam Stephen M. Waltz. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. (International Security by The MIT Press. Vol.9 No.4, 1985) hal. 4

Rosenau memberikan analogi dari variabel sistemik melalui realita geografis sebuah negara ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan ideologis dari *potential aggressors* maka kebijakan luar negeri yang dihasilkan merupakan bentuk penyesuaian atau hasil dari pertimbangan-pertimbangan eksternal pembuat kebijakan.²⁵

Selain variabel-variabel utama di atas yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, ada variabel pendukung yang tidak dapat diabaikan seperti luas wilayah negara, kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta kapabilitas teknologi dalam negeri. Karena kompleksitas variabel yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri tersebut, maka perlu adanya prioritas variabel yang akan dijadikan pertimbangan terkait isu dan permasalahan yang akan direspon.²⁶

Rosenau menyebutkan bahwa sebuah kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan fungsi dari proses disusunnya tujuan sebuah negara. Tujuan yang dimaksud tidak terlepas dari konteks histori sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah serta orientasi masa datang yang menjadi target dari sebuah kebijakan. Jika dilihat berdasarkan waktu, tujuan kebijakan luar negeri dipetakan menjadi tiga, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.²⁷ Tujuan jangka panjang berorientasi pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu seperti perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.

²⁵ Rosenau. *Op. Cit.* Hal 173

²⁶ James N. Rosenau, dalam Anak Agung Banyu P dan Yanyan Mochamad Y, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, Tahun 2006), hal.58

²⁷ Anak Agung Banyu P dan Yanyan Mochamad Y. *Op.Cit*, hal.51

2.3.2 Model Adaptif

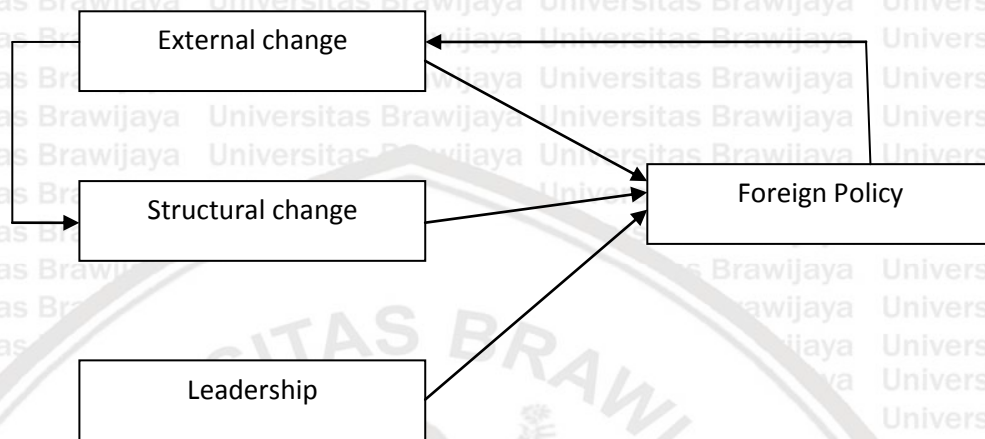
Penulis menggunakan model adaptif kebijakan luar negeri yang diadopsi dari teori kebijakan luar negeri Rosenau dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang ditulis oleh Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani sebagai kerangka pemikiran yang mendasari pembahasan pada bab 5, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

Beberapa teoritis yang meneliti politik luar negeri memilih fokus penelitian pada bagaimana negara-negara memberikan respon terhadap kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya masing-masing. Para teoritis model ini berusaha menekankan ciri-ciri dari lingkungan yang akan menimbulkan akibat-akibat tertentu terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil, terlepas dari tindakan apapun.²⁸

Pada model adaptif ini, Rosenau berusaha memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki sebuah negara serta posisi geopolitiknya. Secara umum, gambaran mengenai kebijakan luar negeri yang dipandang sebagai model adaptif dapat dilihat melalui bagan berikut:

²⁸ Anak Agung Banyu P dan Yanyan Mochamad Y, *Op., Cit*, hal.66

Bagan 2.1
Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri



Sumber :James N. Rosenau dalam Anak Agung Banyu P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, Tahun 2006, hal.67

Model ini melihat sebuah kebijakan luar negeri merupakan sebuah konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dengan kata lain, tindakan politik suatu negara merupakan akumulasi dari dua variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal). Namun dalam perkembangannya ditambahkan sebuah variabel lagi yaitu aspek *leadership* (kepemimpinan) dari elit politik suatu negara dalam waktu tertentu.²⁹

Dalam perspektif ini semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya.

²⁹ *Ibid.* hal.67

Sehingga analisis perspektif adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai satu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah³⁰ dengan meletakkan pertimbangan pada aspek penilaian dari negara tersebut akan kapabilitas yang dimiliki, kondisi geografi dan sebagainya.³¹

Secara khusus Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Maka pemerintah sudah seharusnya melakukan penyeimbangan antara tekanan internal dengan orientasi eksternalnya demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelarasan kondisi internal dengan tujuan yang memiliki orientasi eksternal tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri dapat terjadi ketika lingkup internal meningkatkan tuntutan mengenai kondisi eksternal, atau ketika perkembangan di lingkup eksternal mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan sebuah negara.³² Pada akhirnya kondisi tekanan baik dari eksternal atau internal menjadi tugas bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan tindakan dengan meminimalisir resiko-resiko dan memaksimalkan peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi atau

³⁰ John P. Lovel, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. (New York: Holt, Reinhart, and Winston Inc, 1970). Hal.133-156

³¹ Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy*. (New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1982). Hal.8

³² James N. Rosenau. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. (New York: Nichols Publishing. 1981). Hal. 42

rasionalitas pembuat kebijakan mengenai kondisi lingkungan yang diadapi.³³

2.4 Kerangka Operasional

Dari penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan analisis satu persatu terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Mesir terkait dukungannya kepada Palestina dalam kasus konflik Israel-Palestina.

1. *External change*

Kondisi eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Mesir apabila dikorelasikan dengan sumber-sumber yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka *systemic source* mewakili kondisi *external change* yang hendak dijelaskan oleh penulis. Dalam *systemic source* yang meliputi *size, geography, great power structure, alliances, dan technology* ada beberapa indikasi perubahan sebagai konsekuensi dari pergantian kepemimpinan di Mesir. Secara umum perubahan yang dimaksud bukan merupakan perubahan sekaligus atau perubahan pada keseluruhan dalam unit-unit sumber sistemik. Perubahan yang dapat dipetakan adalah dari pola aliansi Mesir dalam perspektif regional yang berusaha membuka hubungan diplomasi dengan Iran yang sebelumnya membeku. Sedangkan dalam sistem internasional, pola aliansi Mesir tidak mengalami perubahan secara signifikan. Hubungan Mesir-dengan Amerika Serikat sebagai *Great*

³³ *Ibid.* hal.50

Structure Power tetap berjalan serta kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin antara dua belah pihak juga tetap terjaga dengan baik.

2. *Structural Change (Internal)*

Dalam konteks internal, penulis memetakan *structural change* terdiri dari dua aspek penting, yaitu *societal source* dan *governmental source*. Pada *societal source* ada *economic development, cultural and history, social structure, moods of opinion*. Dalam pembahasan lebih lanjut, pada poin *societal*, penulis akan menjelaskan perubahan pada sektor ekonomi seperti kondisi ekonomi yang memburuk menjelang tahun 2011 terutama pada lapisan masyarakat bawah dan struktur sosial seperti munculnya kaum terpelajar dan generasi muda yang menyuarakan pendapatnya melalui media online sehingga membentuk opini-opini publik tertentu yang memicu terjadinya gejolak politik Mesir, serta menjadi salah satu faktor dari adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Mesir.

Sedangkan pada poin *governmental*, penulis akan menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi terkait akuntabilitas politik dan struktur pemerintahan seperti pemilu, kompetisi partai, serta tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara perubahan struktur pemerintahan dapat dilihat dari perubahan kepemimpinan yang berasal berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan. Mesir yang secara politik mengalami perubahan melalui mekanisme pemilu dan adanya pelanggaran terhadap munculnya partai-partai politik baru, secara langsung menunjukkan bahwa

dinamika politik dan secara struktural mengalami perubahan yang signifikan.

3. Leadership

Dalam hal ini, perspektif yang digunakan adalah individu. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian di atas mengenai sumber-sumber kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau, Leadership mencakup *individual source* yang menekankan pada pertimbangan-pertimbangan personal seperti *values, talent, experience, personality of leader*. Pada pembahasan selanjutnya, penulis hendak menjelaskan secara layak mengenai background Mursi yang nantinya dijadikan sebagai salah satu alat bagi penulis untuk memperoleh jawaban atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Selanjutnya sebagai upaya untuk melengkapi kemudahan dalam melakukan analisa pola-pola perubahan dalam kebijakan luar negeri, Rosenau memberikan empat kategori yang berusaha menjelaskan kondisi-kondisi tertentu sebagai bentuk dari adaptasi, yang kemudian dijadikan sebagai skala adaptasi kebijakan luar negeri dari suatu negara sebagai respon yang diberikan atas kendala-kendala dari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh aktor pembuat kebijakan. Keempat skala tersebut dapat dicermati melalui matriks berikut:³⁴

³⁴ James Rosenau. *Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model*. (Journal of Comparative Politics. Vol.2. No3 April, 1970), hal. 379-381

Tabel 2.1

Empat Tipe Kondisi Adaptasi

		EXTERNAL CHANGE	
		High	Low
INTERNAL CHANGE	High	CONVULSIVE	SPIRITED
	Low	DELIBERATIVE	HABITUAL

Habitual adalah kondisi di mana perubahan eksternal dan internal berada dalam skala minimal. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah kondisi yang disengaja. Dengan tidak adanya perubahan yang signifikan baik dalam konteks internal maupun eksternal, maka rutinitas proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan mengcover isu-isu internal dan eksternal dengan baik. Birokrasi masyarakat memberikan respon terhadap *pressures and demands* yang ada dengan menggunakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam *habitual*, partisipasi dari *top-evel official* tidak diperlukan karena birokrasi-birokrasi terkait sudah memiliki wewenang dan peraturan/prosedur yang dijadikan sebagai patokan untuk menjawab *demand and pressure* yang muncul.

Deliberative dalam adaptasi nasional adalah respon terhadap kondisi di mana perubahan internal redah dan perubahan eksternal tinggi. Hal ini



dikarenakan tidak adanya tuntutan baru dari lingkungan internal terhadap pemerintah/ pembuat kebijakan. Di sisi lain, tingginya tingkat perubahan eksternal menuntut tanggung jawab tinggi dari birokrasi dan melibatkan partisipasi *top-level official* dalam proses pembuatan kebijakan.

Spirited dalam tipe adaptasi digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan sebuah kondisi perubahan internal yang terjadi adalah tinggi dan kondisi eksternal rendah. Tingginya tingkat perubahan internal memberikan konsekuensi berupa tuntutan kepada para pembuat kebijakan untuk bertindak secara cepat. Tuntutan internal biasanya memberikan tekanan khusus kepada pembuat kebijakan, karena mengarah pada aspek promosi ke lingkup eksternal daripada penekanan terhadap penyelesaian masalah itu sendiri.

Convulsive adalah tipikal dari kondisi perubahan eksternal dan internal yang tinggi. Dengan kondisi demikian *top-level leadership* dari pemerintahan dituntut untuk mampu menanggapi tuntutan-tuntutan masyarakat dan tekanan-tekanan eksternal yang seringkali bersifat kontradiktif, sehingga upaya yang dikeluarkan dalam mewujudkan keseimbangan antara fluktuasi eksternal dan pergeseran struktural seringkali bersifat tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Kombinasi perubahan internal dan eksternal yang tinggi seringkali membutuhkan kebijakan yang baru untuk mengatasinya. Kebijakan yang sudah ada bisa bersiat tidak relevan untuk menghasilkan penyelesaian secara cepat dan efektif. Di sisi lain *external behavior* yang mengalami perubahan secara tiba-tiba tidak menutup kemungkinan dapat memberikan konsekuensi

ketidakstabilan menjadi bumerang bagi pembuat kebijakan untuk mengambil langkah mundur. Dalam tipe *convulsive* ini *self-sustaining aspect* lebih ditekankan daripada tipe-tipe sebelumnya. Rosenau juga menyebutkan bahwa dalam level ini, perubahan yang terjadi memiliki intensitas yang tinggi dalam membentuk kenaikan tensi sistem internasional.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

Kebijakan luar negeri Mesir terkait konflik Israel-palestina di bawah kepemimpinan presiden Mursi tahun 2012-2013 merupakan bentuk dari perubahan kebijakan luar negeri Mesir dari era sebelumnya. Perubahan orientasi kebijakan luar negeri tersebut dipengaruhi oleh faktor perubahan eksternal, perubahan struktural (internal), dan perubahan/pergantian pemimpin itu sendiri yang mengakibatkan Mesir mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru terkait konflik Israel-Palestina sebagai bentuk adaptasi dari perubahan yang terjadi akibat kenaikan iklim politik Mesir 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dan Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif. Jika dalam metode kuantitatif penelitian didasarkan pada perhitungan presentase, rata-rata, kuadrat dan perhitungan statistik lainnya, maka penelitian kualitatif lebih merujuk pada segi alamiah dari sebuah fenomena.¹ Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.² Sejalan dengan definisi dari denzin dan Lincolnyang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam hal tersebut, metode yang dimaksud dapat berupa wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³ Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami situasi tertentu.⁴

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam menganalisa fenomena yang diangkat adalah eksplanatif. Dalam penelitian eksplanatif seperti yang

¹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya, 2013), Hal. 3

² *Ibid.* Hal. 4

³ *Ibid.* Hal. 5

⁴ *Ibid.* Hal. iii

dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood, yang dimaksud dengan eksplanasi adalah upaya menjawab pertanyaan mengapa.⁵ Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penulis berusaha menjelaskan sebab-sebab perubahan kebijakan luar negeri Mesir dalam memberikan dukungannya kepada Palestina dalam konflik Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mursi tahun 2012-2013 melalui pengumpulan data-data yang dikumpulkan penulis dalam studi pustaka yang kemudian akan digunakan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif untuk memahami dan mendapat jawaban dari isu yang diangkat oleh penulis.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah dari tahun 2012 hingga tahun 2013 yang merupakan periode waktu kepemimpinan Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai acuan utama untuk memperoleh

⁵ Mohtar Masoed. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES,1994), hal. 262

data-data sebagai sumber informasi terkait penelitian. Dalam studi kepustakaan, penulis mengkombinasikan berbagai sumber yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, laporan, dll yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder meliputi proses pengumpulan berbagai data yang relevan dengan topik terkait, kemudian diseleksi terlebih dahulu sebelum ke tahapan pengaplikasian data dalam tulisan.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan kemudian direduksi. Reduksi data dalam artian merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, mengeliminasi data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data hingga ditemukan kesimpulan-kesimpulan akhir pada penulisan.⁶ Reduksi data yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan pada sistematika penulisan.

3.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan penelitian ini disusun berdasarkan enam bab sebagai berikut:

⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 340.

Bab I merupakan pendahuluan, yang digunakan sebagai pemaparan garis besar penulisan, yang di dalamnya terdapat latar belakang dan permasalahan yang diangkat, kemudian disertakan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Bab II merupakan kerangka pemikiran untuk membangun alur logika dan menjawab rumusan masalah. Secara komprehensif bagian ini berisi pemaparan secara rinci dan jelas mengenai studi pustaka yang digunakan sebagai bahan untuk analisa data yang telah dikumpulkan, kerangka teori digunakan sebagai upaya untuk membangun hipotesa, serta operasionalisasi konsep yang berisi konsep-konsep yang ada dalam uji variabel dan hipotesa yang selanjutnya akan diuji kebenarannya.

Bab III merupakan pembahasan secara teknis tentang metode penulisan yang digunakan. Teknik pengumpulan data disertai dengan penjelasan mengenai pengolahan data serta sistematika penulisan penelitian menjadi garis besar yang termuat dalam bab ini.

Bab IV berisi gambaran umum yang merupakan garis besar uraian yang mendasari isu yang diangkat oleh penulis. Ada dua sub bab utama dalam bab IV yaitu, *pertama* adalah Penggulingan Mubarak dan Terpilihnya Mursi, yang di dalamnya dijelaskan secara kronologis mulai awal terjadinya gejolak politik 2011 yang merupakan rangkaian dari *Arab Sprig* hingga terpilihnya Musri sebagai presiden baru yang menggantikan Muarak. *Kedua* adalah Mesir dalam Konflik Israel-Palestina yang terdiri dari dua pembahasan yaitu penjelasan

tentang sikap Mesir di bawah Mubarak dan siap Mesir di bawah Mursi. Dalam bab IV tersebut penulis mencantumkan data-data secara komprehensif yang berfungsi untuk menunjang nilai-nilai validitas karya yang dilakukan oleh penulis.

Bab V berisi pembahasan utama dalam penelitian ini. Pembahasan ini dibagi kedalam tiga sub bab utama yaitu: *External Change, Structural Change, dan Leadership*. Dalam bab Pembahasan tersebut, penulis berusaha menjabarkan model sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Bab VI merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran mengenai penelitian-penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari proses analisa dan pengolahan data pada bab-bab sebelumnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Penggulingan Mubarak dan terpilihnya Mursi

4.1.1 Arab Spring dan Gejolak Politik Mesir 2011

Akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami gejolak politik yang hampir serupa. Kenaikan iklim politik di Timur Tengah ditandai dengan berbagai aksi masyarakat yang menuntut pemimpin negara untuk turun dari jabatan terjadi dalam kurun waktu yang nyaris bersamaan. Dimulai dari Tunisia, menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan negara-negara lainnya di kawasan tersebut.¹

Tunisia dianggap sebagai pelopor negara sekitar dalam menuntut presiden untuk turun jabatan. Kesuksesan Tunisia dalam memaksa presiden untuk meninggalkan jabatan, menjadi salah satu faktor yang mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal serupa. Adanya kesamaan faktor seperti kemiskinan, pengangguran yang tinggi, serta sistem pemerintahan yang korup, Mesir menjadi negara kedua di kawasan Timur tengah yang mengikuti jejak Tunisia.²

¹ Apriadi Tamburaka. *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, (Yogyakarta: NARASI 2011), hal.9

² *Ibid.* Hal.11

Rentetan peristiwa politik yang melibatkan sejumlah negara di kawasan tersebut dinamakan Arab Spring oleh sebagian besar pengamat. Salah satu hal yang menarik dari fenomena *Arab Spring* yang kemudian disoroti oleh berbagai pihak adalah perbedaan pola pergantian kepemimpinan yang terjadi di negara-negara yang sama pada sekitar setengah abad sebelumnya. Dulu pergantian kekuasaan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dimotori oleh kaum militer, sedangkan Arab Spring banyak dipelopori oleh masyarakat sipil dan bangkitnya kelas menengah di kawasan tersebut.³

Gejolak politik dan protes dari masyarakat sipil dimulai dari sebuah kasus aksi bakar diri seorang pemuda bernama Muhamed Bouazizi di Tunisia sebagai bentuk ekspresi keputusasaan atas kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Kejadian tersebut memicu aksi demonstrasi yang mengarah pada tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Sejumlah aksi bakar diri telah terjadi juga di negara-negara Arab lainnya. Di Aljazair, ada Mohsen Bouterfif yang juga melakukan aksi bakar diri setelah pertemuannya dengan walikota yang tidak membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Di Mesir seorang pemuda bernama Abdou Abdel-Moneim Jaaafar juga melakukan hal yang sama di depan Gedung Parlemen Mesir.⁴ Orang-orang yang melakukan aksi tersebut dianggap sebagai pahlawan yang rela berkorban dan merepresentasikan

³ Rhiza S. Sadjad, kebangkitan, *Masyarakat Sipil Kelas Menengah* http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwah-lokal/Arab_Spring.pdf, (diakses pada 02-05-2017)

⁴ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, (Yogyakarta: NARASI, 2011), hal.10

penderitaan atas kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat di negara-negara tersebut sehingga setelah kejadian-kejadian aksi bakar diri tersebut banyak aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat untuk menuntut pergantian pemimpin dan kesejahteraan ekonomi.

Dari rangkaian kenaikan iklim politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang terjadi nyaris serentak tersebut, dipicu oleh beberapa faktor yang secara umum adalah sebagai berikut:⁵

1. Rakyat Timur Tengah memiliki kultur yang hampir sama, yaitu bangsa Arab dan di dominasi oleh kaum Muslim yang dulunya memiliki catatan kejayaan di masa lampau. Sehingga meski terbagi ke dalam negara yang berbeda-beda, ikatan persaudaraan, senasib dan sepenanggungan masih kuat dimiliki oleh satu sama lain.
2. Sama-sama pernah mengalami penjajahan kolonialisme selama beberapa dekade. Bangsa yang pernah mengalami masa penjajahan memiliki psikologis dan traumatik tertentu. Tunisia dan Aljazair pernah dijajah oleh Perancis, Mesir pernah dijajah oleh Inggris.
3. Pasca-kemerdekaan dari kolonialisme, negara-negara tersebut dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Dominasi kepemimpinan yang bersifat mutlak tanpa adanya *control aan balancing* dari pihak kedua memberikan tendensi pada sebuah kepemimpinan yang bersifat korup. Akibatnya kondisi ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan negara-negara tersebut tidak dapat dirasakan oleh kebanyakan rakyat

⁵ *Ibid.* Hal 12-13

melainkan oleh segelintir orang dan yang dekat dengan kepemimpinan.

Hal tersebut membuat rakyat geram dan memicu aksi-aksi yang terjadi untuk menuntut adanya perubahan kepemimpinan sehingga membawa perbaikan dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.

Mesir merupakan negara kedua yang melakukan aksi penurunan preside dalam rangkaian Arab Spring. Salah satu faktor yang sangat krusial dalam mendorongnya adalah kondisi perekonomian yang cenderung terpusat. Masyarakat banyak yang mengeluhkan bahwa pembangunan dan perekonomian Mesir tidak terdistribusi secara merata, kalangan bawah tidak ikut menikmati. Harga kebutuhan pokok tinggi sedangkan standar hidup dan daya beli masyarakat relatif stagnan.⁶

Mesir merupakan negara terbesar ketiga sebagai penerima bantuan dana dari Amerika Serikat setelah perang Irak. Selain itu pendapatan utama perekonomian Mesir berasal dari sektor pariwisata serta lalu lintas yang melewati Terusan Suez. Meskipun bantuan dana asing tergolong besar (\$2,2 miliar per tahun) dan beberapa sumberdaya yang potensial untuk meningkatkan perekonomian Mesir, akan tetapi masalah dasar Mesir adalah pengangguran kaum muda. Dengan jumlah angkatan kerja yang terserap hanya sekitar 4 persen per tahun, pengangguran di Mesir hampir 10 kali lebih tinggi untuk lulusan perguruan tinggi.⁷

⁶ *Ibid.* Hal 70

⁷ *Ibid.* Hal.71

Korupsi dalam tubuh Kementerian Dalam Negeri Mubarak meningkat secara drastis sebagai akibat legitimasi sistem kelembagaan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan jabatan dan kekuasaan presiden.⁸

Kondisi prekonomian yang hanya dinikmati oleh segelintir kalangan di Mesir pada akhirnya menempatkan Mubarak sebagai sosok pemimpin yang dipaksa turun jabatan oleh rakyatnya sendiri. Selain dari keterdesakan ekonomi, ada hal-hal yang tidak dapat diabaikan dari peristiwa politik Mesir tahun 2011 seperti, peranan media online yang menjadi penggerak khususnya tokoh-tokoh pemuda, dan munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memetakan faktor pemicu pecahnya iklim politik Mesir pada 25 Januari 2011 ke dalam tiga aspek utama, ekonomi, politik, dan sosial:⁹

a. Economic Level

Kondisi ekonomi Mesir secara keseluruhan sebelum 2011 menunjukkan kenaikan prestasi yang signifikan. GDP mesir menunjukkan kenaikan dari sekitar 5% pada pertengahan tahun 1990 hingga menjadi 7% pada 2006-2008. Pangsa perdagangan global Mesir yang selama 40 tahun terakhir mengalami penurunan secara terus-menerus, pada akhirnya mengalami kenaikan seiring ditingkatkannya kuota ekspor menjadi tiga kali lipat. Nilai investasi asing mencapai

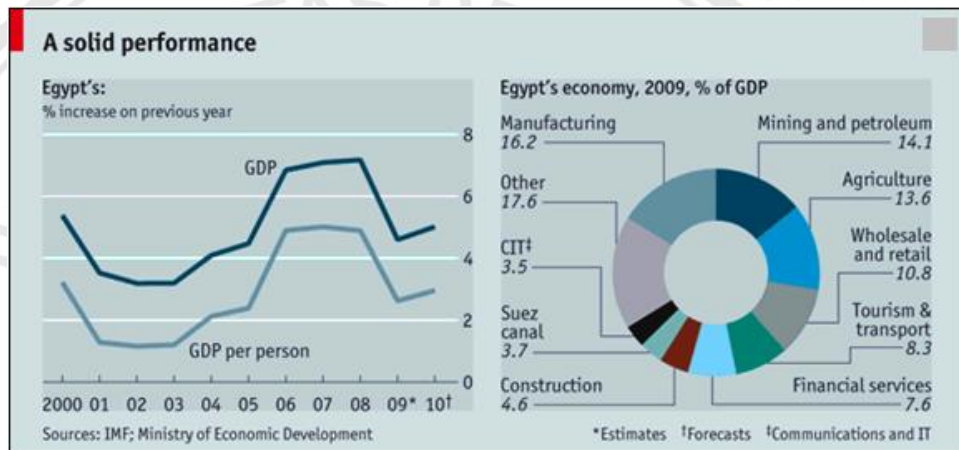
⁸ *Ibid* hal 72

⁹ Noha Bakr. *The Egyptian Revolution*. Hal. 2-11

catatan rekor yang tinggi, total kumulatif antara \$ 46 miliar dalam rentang tahun 2004 hingga 2009. Hutang negara turun hampir sepertiga dari keseluruhan. Penurunan angka hutang luar negeri yang mencapai jumlah di bawah cadangan nilai devisa tersebut merupakan prestasi pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa.

Gambar 4.1

Grafik GDP Mesir Tahun 2000-2010



Sumber: “*Holding it’s Breath: A Special Report on Egypt*”, *The Economist* (17 Juli 2010). Hal. 8, dalam Noha Bakr. *The Egyptian Revolution*.

Grafik kenaikan GDP Mesir tersebut membawa pada sebuah pertanyaan besar yang bersifat paradoks. Jika ekonomi menunjukkan prestasi yang meningkat, mengapa terjadi pemberontakan rakyat pada 25 Januari 2011?

Pada tingkat ekonomi, angka GDP menunjukkan perkembangan, tetapi ada ketidakseimbangan di dalamnya. Secara keseluruhan, GDP Mesir merupakan tanda kebaikan, tetapi kesenjangan sosial di Mesir

adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Pertumbuhan ekonomi sebelum tahun 2011 adalah merepresentasikan pertumbuhan ekonomi segelintir kelompok. Pada kenyataannya angka pengangguran mencapai 9,7% yang terkonsentrasi pada kalangan pemuda dengan gelar sarjana.

b. *Political Level*

Di tingkat nasional, Noha Bakr mengidentifikasi bahwa suasana politik di Mesir menjelang 2011 mengalami degradasi. Sejumlah aspirasi muncul dari rasa keterasingan kaum muda di negaranya sendiri serta didukung penggunaan media daring yang menjadikan informasi tersebar secara masif dalam waktu singkat. *Pertama*, Pelanggaran HAM di Mesir termanifestasikan pada sikap aparat dalam menghadapi demonstrasi di kota Mahalla April 2008, kematian warga karena aparat penegak hukum seperti yang terjadi pada Emad El Kabir dan Khaled Said, menjadi bumerang bagi pemerintahan Mubarak.¹⁰ Selain itu, pemerintahan Mubarak dianggap kurang toleransi terhadap kaum minoritas. *Kedua*, Kasus kekerasan yang terjadi pada sejumlah biara-biara kristen koptik tidak memiliki penyelesaian yang jelas.¹¹ Kerusuhan dan pengeboman juga masih terjadi di sejumlah gereja pada hari-hari besar tertentu yang mengakibatkan banyak korban, misalnya malam tahun baru 2011 sebuah gereja di Alexandria menjadi sasaran teroris, 23 meninggal dan 97 luka-luka.

¹⁰ *Ibid.* hal. 5

¹¹ Noha Bakr. *Op. Cit.* Hal. 2-11

Kaum koptik pada awalnya mendukung Mubarak yang bertindak sebagai penghalang fundamentalisme islam di Mesir. Setelah beberapa insiden yang mengakibatkan terpojoknya kaum minoritas dan kegagalan rezim Mubarak di beberapa sektor mengakibatkan penurunan simpati dari kelompok tersebut.

Ketiga, Noha Bakr menegaskan bahwa sistem pemerintahan Mubarak mengeluarkan modifikasi konstitusi yang menuju kearah kekuasaan secara turun-temurun. Sejumlah artikel dibah pada 2005 untuk memenuhi kebutuhan pemilihan presiden November 2011 yang membuka kesempatan besar bagi anak Mubarak untuk melanjutkan kekuasaan dan memperkecil peluang kompetisi dari kandidat lain. *Keempat*, hasil pemilihan parlemen tahun 2010 yang menempatkan mayoritas anggota parlemen dari NDP, diduga ada kecurangan. *Kelima*, sistem politik yang ada tidak memiliki penyerapan kepada kaum muda dan kelas menengah baru, kondisi tersebut membawa pada sistem yang bersifat eksklusif.

Dari faktor-faktor yang terakumulasi tersebut, akhirnya memicu pecahnya iklim politik yang bersifat konfliktual pada 25 Januari 2011. Rezim Mubarak tidak hanya gagal dalam membaca tanda-tanda tetapi juga melakukan mekanisme yang tidak tepat dalam mengelola situasi gejolak politik yang terjadi. Rezim Mubarak menunjukkan sikap yang konfrontatif kepada kaum demonstran dengan gas air mata, peluru karet, dan meriam. Penghentian sarana komunikasi dan internet yang

ditujukan untuk meredam gejolak justru sebaliknya, kemarahan masyarakat semakin tidak terbandung.

Di tingkat regional, Bakr melihat Mesir menjelang tahun 2011 bukan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar. Mesir yang sempat berpengaruh pada tahun 1960an hingga awal 1970an sebagai salah satu pemimpin Pan-Arabisme, telah kehilangan posisinya. Dunia Arab tidak lagi didominasi oleh media, kesenian, atau tokoh pemimpin yang menjadi inspirasi regional dari Mesir. Al-Jazeera, *oil power*, dan gerakan keagamaan telah mengambil alih peran Mesir di tingkat regional.

Dalam konteks Afrika, Mesir tidak memiliki peranan apapun, karena anggapan negara-negara Afrika terhadap Mesir sebagai negara yang tidak kooperatif. Hal tersebut membawa posisi Sungai Nil sebagai sumber friksi antara Mesir dengan negara-negara Afrika Nil.¹²

Di tingkat internasional, lebih lanjut Bakr menyebutkan, Mesir merupakan sekutu kuat Amerika Serikat. Mesir menjadi pelopor perdamaian dengan Israel. Kebijakan-kebijakan Mubarak seperti penutupan perbatasan Rafah dan terowongan, menempatkan Hamas pada posisi yang sulit. Selain kerjasama dalam melawan terorisme, akses wilayah udara Mesir dan erusan Suez juga mendapat jaminan dari AS. Bantuan ekonomi sebesar \$ 2 miliar per tahun juga diterima Mesir sejak penandatanganan perjanjian Camp David, \$ 1,3 miliar dialokasikan untuk

¹² *Ibid.* hal. 2-11

pengembangan sektor militer, dan sisanya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Meski tahun 2010 ada penurunan bantuan menjadi \$ 1,55 miliar, tetapi Mubarak tidak melakukan pemangkasan untuk dana pengembangan militer. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan Mesir di level internasional memicu tingkat frustrasi dan ketidakpuasan atas melemahnya kekuatan Mesir kepada Arab Saudi, Qatar dan Turki. Puncak frustrasi terjadi dalam hal konflik Israel Palestina. Masyarakat awam menilai Mesir di bawah Mubarak adalah tidak lebih dari subordinasi AS.

c. Social Level

Sebelum 2011, data statistik Mesir menunjukkan pertumbuhan populasi yang cepat. Tahun 2010 Angka populasi kaum Muda diklaim sebesar 23,5% yang terdiri dari rentang usia 18-29 tahun. Dengan kata lain, Mesir memiliki populasi generasi muda yang tinggi. 90% dari keseluruhan penduduk Mesir adalah penganut agama Islam, 9% Kristen koptik, dan sisanya adalah etnis minoritas suku Nubia dan Badui Sinai.¹³

Indikator pembangunan sosial Mesir menunjukkan upaya serius dalam sektor kesehatan sehingga angka kematian bayi menurun dan angka harapan hidup meningkat rata-rata 73 tahun. Angka buta huruf juga menurun, tetapi kuantitas yang tercatat tidak menunjukkan

¹³ *Ibid.* hal 2-11

keseimbangan dalam hal kualitas pendidikan yang memungkinkan persaingan di dunia kerja.¹⁴

Statistik penggunaan IT di Mesir juga menunjukkan data kemajuan yang signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal jangkauan dan cakupannya. Dua puluh juta orang yang mayoritas pemuda memiliki akses internet. Dalam banyak hal, Mesir diklasifikasikan sebagai salah satu kekuatan baru yang muncul di bidang teknologi informasi. investasi pemerintah di bidang ini ditujukan untuk menarik investor multinasional seperti Oracle dan SAB untuk *outsourcing* dan membangun *call center*.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hal. 2-11

¹⁵ *Ibid.* hal 2-11

Gambar 4.2
Tabel Indikator Sosial Mesir

Better lives		
Egypt, social indicators		
	1990	2009
Population (m)	57.8	83.1
Labour force (m)	14.3	25.4
Fertility rate (births per woman)	5.2*	2.9†
Infant mortality (per 1,000 births)	78.5*	34.8†
Literacy (%)	57.0‡	72.0§
Electricity consumption (kwh per person)	644	1,460
Fixed telephone lines and mobile-phone contracts per 100 pop	2.8	79.1
Passenger cars per 1,000 pop	18.7	33.3**

*1985-90 †2005-10 ‡1986 §2008 **2006
Sources: Economist Intelligence Unit; ITU; UNESCO; UN Population Division; International Road Federation

Sumber: Holding its Breath: A Special Report on Egypt, The Economist (17 Juli 2010). Hal 4. Dalam Noha Bakr. The Egyptian Revolution.

Paradoks sosial antara data kenaikan kesejahteraan sosial masyarakat Mesir terutama terkait penggunaan internet dan akses komunikasi yang leluasa, lalu mengapa terjadi ketidakpuasan rakyat yang memicu peristiwa 25 Januari? Populasi Mesir yang ditandai dengan usia muda, pengangguran yang tinggi, dan besarnya angka lulusan pendidikan universitas yang tidak terserap tenaga kerja, tercatat ada 700.000 lulusan baru setiap tahun dan bersaing untuk 200.000 pekerjaan. Faktor sosial, ekonomi, dan politik yang terangkum dalam ketidakpuasan

menjelang gejolak politik 2011, adalah tanda-tanda serius dari kejatuhan rezim Mubarak. Tahun 2004 ada sekitar 266 tindakan protes, tahun 2008 meningkat mencapai 630 dan tahun 2010 rata-rata setiap 5 hari sekali terjadi protes terhadap pemerintah.¹⁶

4.1.2 Berakhirnya Rezim Mubarak

Muhammad Hosni Said Mubarak yang menjabat sebagai presiden Mesir sejak periode 14 Oktober 1981 harus turun jabatan pada 11 februari 2011. Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden pada tahun 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan udara Mesir. Kemudian, ia menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Anwar Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal.¹⁷ Mubarak merupakan Presiden Mesir keempat untuk masa jabatan lebih dari 15 tahun sejak menjabat pada tahun 1981. Sebagai presiden mesir, ia dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya.

Mubarak dan Partai Demokrasi Nasional (NDP) berkuasa terus menerus sebagai partai tunggal sebagai akibat masih berlakunya keadaan darurat terus menerus pasca kejatuhan Anwar Sadat dari Amerika Serikat dalam mempertahankan kebijakan untuk menekan potensi tumbuhnya militan islam yang dianggap mengganggu perdamaian dengan Israel. Rakyat Mesir dan sejumlah media termasuk beberapa kelompok yang memosisikan diri sebagai pengkritik kepemimpinan Mubarak sering

¹⁶ *Ibid.* hal 7

¹⁷ *Ibid.* hal. 66

membandingkan Hosni Mubarak dengan Firaun Mesir oleh karena tipikal kerasnya Mubarak dalam memimpin.¹⁸

Sejak pecahnya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Mesir yang dimulai pada 25 Januari 2011, pemerintah langsung mengambil tindakan berupa pemblokiran sosial media Twitter, yang digunakan demonstran untuk mengkoordinasi protes.¹⁹ Pemblokiran Twiter memicu amarah warga yang semakin tidak terbendung, perhatian dari media internasional pun juga turut menyoroti demonstrasi anti pemerintahan yang terjadi di Mesir.

Kerusuhan semakin meningkat, arus protes semakin tinggi dan selang tiga hari setelah pemblokiran Twitter, pemerintah Mesir mengambil langkah yang lebih tegas berupa pemblokiran layanan internet di seluruh Mesir dan baru dibuka kembali pada 2 Februari 2011. Strategi pemblokiran sosial media dan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meredam dan mengurangi tensi kerusuhan serta penyebaran arus informasi terkait keterpurukan pemerintahan Mesir di bawah Mubarak, akan tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Aksi demonstrasi semakin meningkat dan masyarakat tidak kehabisan cara-cara untuk menyasati keterbatasan informasi dan layanan komunikasi yang dimiliki.²⁰

Karena tuntutan warga terhadap pemerintahan Mubarak semakin meningkat, akhirnya tanggal 4 Februari 2011 Mubarak mengeluarkan statement secara resmi tentang pengakuannya atas ketidakpuasan warga

¹⁸ *Ibid*, hal.68

¹⁹ *Ibid*, hal.77

²⁰ *Ibid*, hal. 82

Mesir terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya selama ini, Mubarak menyampaikan akan memperbaiki dengan cara membentuk pemerintahan baru. Statement yang dikeluarkan Mubarak merupakan sebuah upaya defensif atas keterdesakan posisi yang dimilikinya, namun ia masih berusaha mempertahankan jabatannya sebagai kepala pemerintahan Mesir yang tersisa kurang lebih 7 bulan lagi.²¹

Dialog antara pemerintah yang diwakili oleh Wakil Prsiden Mesir Omar Suleiman dengan representasi dari kelompok-kelompok oposisi juga ditempuh untuk mencari solusi ketegangan politik yang terjadi. Pemerintah menawarkan konsesi baru termasuk kebebasan pers, pembebasan para tahanan yang melakukan aksi protes anti-pemerintahan, dan pencabutan undang-undang darurat. Wakil Presiden Omar Suleiman juga memberikan tawaran untuk mendirikan sebuah komite reformasi konstitusi peradilan yang akan memungkinkan lebih banyak kandidat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan menerapkan batasan masa jabatan presiden.²² Upaya dialog yang ditempuh oleh kedua kubu tersebut tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Perwakilan dari kelompok-kelompok oposisi pemerintah menyetujui adanya usulan-usulan positif Wakil Presiden Omar Suleiman, tetapi tuntutan inti kepada Presiden Mubarak untuk segera turun jabatan menjadi agenda kelompok oposisi yang tidak dapat ditawar. Sebelum Mubarak turun dari jabatan, perwakilan dari kelompok demonstran yang oposisi kepada pemerintah melakukan penolakan adanya dialog lanjutan.

²¹ *Ibid*, hal.82

²² *Ibid*. hal.93

Menanggapi penolakan tersebut, Omar Suleiman mengeluarkan sebuah peringatan tajam berupa darurat militer kepada kelompok oposisi yang melakukan demonstrasi di alun-alun. Proses tarik ulur yang dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk tetap mempertahankan kedudukan Mubarak tidak memberikan hasil yang signifikan, justru sebaliknya akumulasi kemarahan dan aksi warga semakin memuncak.²³

Pada hari Jumat 11 februari 2011 menjadi titik terang bagi rakyat Mesir yang kurang lebih dalam 18 hari terakhir melakukan aksi demonstrasi. Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan kontrol pemerintahan sementara diserahkan kepada militer. Pernyataan pengunduran diri Mubarak disampaikan oleh Omar Suleiman.²⁴ Kabar pengunduran diri Mubarak tersebar ke seluruh Mesir secara pesat. Sorak sorai warga memecah di beberapa kawasan seperti di kairo dan kota-kota besar lainnya.

Kemenangan dirayakan dengan puluhan ribu demonstran yang memadati Tahrir Square dengan menyerukan sorakan kemenangan lengkap dengan bendera Mesir yang berkibar. Peristiwa tersebut juga mendapat respon positif dari berbagai negara yang berisi ucapan selamat dan dukungan untuk segera melakukan perubahan baik sesuai yang diharapkan oleh rakyat Mesir.

²³ *Ibid*.hal.95

²⁴ David Akhmad ricardo, *Revolusi Mesir Revolusi rakyat*, (Jakarta: Arus Timur, 2011). hal 90

4.1.3 Mesir *Vacuum of Power* dan diambil alih oleh SCAF (Dewan Militer)

a. Peran militer dalam pemerintahan Mesir setelah Mubarak meninggalkan jabatan tahun 2011

Selain dinamika politik islam yang sering menjadi sebuah pembahasan khusus terkait pergolakan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, politik militer juga menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari isu politik dan keamanan yang terjadi khususnya di Mesir.

Kedekatan Militer dengan ranah politik dalam pemerintahan, maka dalam kondisi darurat seperti penurunan kekuasaan, militer menjadi satu-satunya tokoh yang dianggap rasional untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang terjadi. Februari 2011 hingga Agustus 2012 Dewan Militer Mesir memegang wewenang untuk melakukan kontrol dan membuat kebijakan-kebijakan tentang harapan masyarakat Mesir yang menjadi pemicu peristiwa 2011.²⁵

Pengunduran diri Mubarak, menghadapkan Mesir pada sebuah situasi *vacuum of power*. Pada akhirnya penunjukkan kepada pihak militer/ SCAF (Supreme Council of the Armed Forces) yang dipimpin oleh Mohammed Husein Tantawi menjadikan kontrol dan pemerintahan sementara berada di bawah kekuasaan militer. Di sisi lain, kondisi Mesir setelah ditinggal Mubarak belum stabil. Demonstrasi masih terus

²⁵ Jeremy M Sharp. *Egypt Background and U.S Relations*, (Congressional Research Service, tahun 2013), hal. 9

berlangsung. Kebebasan berpendapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menyerukan aspirasinya. Bahkan polisi yang pada awalnya bersikap keras kepada para demonstran sebelum penggulingan Mubarak, juga ikut melakukan demonstrasi untuk kenaikan gaji.²⁶ Dengan demikian, tantangan terbesar bagi Dewan Militer adalah tentang keamanan dan stabilitas internal yang menuntut untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

Dewan militer menyatakan bahwa pengembalian stabilitas politik dan kemandirian Mesir serta persiapan menuju pemilihan umum secara demokrasi menjadi agenda utama SCAF.²⁷ Kendati demikian aksi demonstrasi tetap dilakukan di Tahrir Square, rakyat mendesak Dewan Militer yang dikepalai oleh menteri Pertahanan, Hussein Tantawi untuk segera menggelar pemerintahan transisi dengan menunjuk Dewan Presiden, membubarkan parlemen, dan membebaskan para tahanan politik.

Tanggal 17 Februari 2011, Dewan Militer Mesir menangkap tiga orang mantan menteri yang menjabat di era Mubarak atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri Habib el-Adly, mantan Menteri Perumahan Ahmed Maghrabi, mantan Menteri Pariwisata Zuheir Garana, dan Ahmad Ezz yang pernah menjadi petinggi di partai NDP.²⁸

²⁶ *Ibid.* Hal.102

²⁷ *Ibid.* Hal. 103

²⁸ *Ibid.* Hal 103

Al-adly yang memiliki wewenang atas 500.000 aparat keamanan, dituduh telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memerintahkan para anggota aparat tersebut untuk menyerang demonstran yang melakukan aksinya sejak 25 Januari 2011 hingga pengunduran diri Mubarak 11 Februari 2011. Tercatat lebih dari 300 demonstran tewas akibat bentrok dengan aparat maupun dengan massa pro-Mubarak.²⁹ Sementara itu, ketiga mantan pejabat tinggi lainnya, Maghrabi, Garana, dan Ezz, ditangkap atas tuduhan korupsi, pencucian uang, dan menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.³⁰ Gelombang demonstrasi anti Mubarak selama lebih dari dua pekan menilai pemerintahannya dipenuhi dengan pejabat korup.

Selain pemecatan kepada beberapa pejabat era Mubarak, Dewan Militer juga mengambil keputusan untuk membubarkan parlemen. Pembubaran tersebut dilakukan bersamaan dengan diselenggarakannya pemilu presiden pada putaran kedua, Juni 2012.³¹

Beberapa langkah di atas merupakan strategi SCAF untuk mewujudkan stabilitas nasional dan transisi pemerintahan secara tidak mencolok, tetapi pada konteks eksternal kebijakan luar negeri yang dibentuk cenderung berfokus pada Israel dan AS. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memiliki karakteristik untuk memaksimalkan kekuatan militer dan menjaga *status quo*. Posisi SCAF di tempat tertinggi sebagai aktor

²⁹ *Ibid.* Hal.104

³⁰ *Ibid.* Hal.104

³¹ BBC Indonesia 17 Juni 2012, dalam:

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/06/120616_parlemen_mesir_bubar.shtml,

(diakses pada 11 Mei 2017)

pembuat kebijakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan militer melalui langkah-langkah kebijakan yang diambil. Peristiwa politik 2011 didasari oleh faktor internal secara mayoritas, sehingga ada harapan bagi SCAF untuk melanjutkan politik luar negeri yang setipe dengan sebelumnya.³²

4.1.4 Terpilihnya Mursi Sebagai Presiden Baru

Pemilihan Presiden mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Ada 13 kandidat yang terdaftar dalam pemilu pertama secara demokratis tersebut yang kemudian dari 13 kandidat tersisa dua calon unggul yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Mursi merupakan kandidat dari *Freedom Justice Party* yang merupakan sayap politik dari kelompok kepentingan Ikhwanul Muslimin yang berbasis keagamaan, sedangkan Ahmad Syafiq berasal dari background militer.³³ Pada akhirnya Mursi yang memenangkan pemilu tersebut.

Terpilihnya Mursi sebagai presiden Mesir merupakan babak baru yang menandai proses demokrasi di negara tersebut. Mesir yang selama beberapa dekade terakhir dipimpin oleh tokoh yang berasal dari kalangan militer sejak Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Hingga Hosni Mubarak, pada akhirnya memiliki pemimpin yang berasal dari kalangan sipil.³⁴ Hal

³² Fazzur Rahman Siddiqui, *Changing Countours of Egypt's Foreign Policy in The Aftermath of Uprising*. (Indian Council of Word Affairs. 8 September 2016). Hal 5

³³ Sita Hidriyah, *Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir*. (Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No.13/I/P3DI/Juli/2012). Hal. 7

³⁴ *Ibid.* Hal 7

tersebut merupakan representasi dari keputusan mayoritas rakyat mesir yang memiliki kejenuhan tertentu dengan tipikal pemimpin dari bidang militer.

Kondisi Mesir setelah peristiwa politik 2011 masih cenderung konfliktual dan tidak stabil. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Mursi dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Di sisi lain dengan posisi geopolitik yang sangat strategis, Mesir dituntut untuk mampu menjaga stabilitas politik regional.³⁵ Agenda-agenda stabilitas dan keamanan menjadi prioritas dalam skala kebijakan yang diambil oleh Mursi.

Dari tuntutan-tuntutan terhadap penyelesaian isu politik dan keamanan yang dihadapi, Mursi juga dihadapkan pada situasi paradoksial. Antara lain problematika dari Dewan Militer yang belum sepenuhnya melepaskan kekuasaan sepenuhnya kepada presiden terpilih serta kepentingan dari kelompok yang telah mengusung dan memenangkan Mursi dalam pemilihan presiden , yaitu Ikhwanul Muslimin.

Ketidakserasian antara Dewan Militer dengan pemerintahan Mursi, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi yang berada di bawah wewenang Dewan Militer mengeluarkan konstitusi sementara yang berisi tentang pembubaran parlemen tepat pada saat terpilihnya Mursi sebagai presiden. Hal tersebut, secara otomatis memberikan kekuasaan pada Dewan Militer untuk mengambil alih legislatif. Militer juga memiliki otoritas untuk memilih oprang-orang yang akan membentuk konstitusi baru.³⁶

³⁵ *Ibid.* Hal 8

³⁶ Lisbet, *Krisis Politik di Mesir dan Posisi Indonesia*, (Info Singkat Hubungan Internasional. Vol.V.NO.14/II/P3DI/Juli/2013). Hal. 6

Disharmonisasi antara Militer dan dalam badan pemerintahan Mesir dapat dipetakan dari tipikal kebijakan yang dikeluarkan oleh Mursi.

4.2 Mesir Dalam konflik Israel Palestina

Berbicara tentang Mesir dalam konteks konflik Arab-Israel, maka penulis bermaksud meletakkan urgensi pada periode historis antara tahun 1973-1979 yang menjadi penanda sejarah Mesir dalam *triangular relationship*. Periode waktu tersebut Mesir (dan aliansi) berada dalam pasca ketegangan dengan Israel (perang enam hari). Di bawah presiden Anwar Sadat, Mesir melakukan keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Mesir menggalang aliansi dengan Amerika Serikat untuk memperoleh solusi damai dengan Israel.³⁷

Tahun 1973 adalah langkah awal diplomasi Mesir dengan Amerika Serikat melalui Menlu Kissinger untuk membahas lebih lanjut tentang gagasan damai dengan Israel. Sebagai hasilnya, tahun 1979 terbentuk perjanjian damai Mesir-Israel, Camp David. Camp David adalah bentuk komitmen jangka panjang Mesir dalam menggandeng great power untuk memperoleh garansi keamanan, baik dari segi politik maupun ekonomi.³⁸

Secara umum, perjanjian Camp David berjalan dengan baik dan efektif. Dalam 30 tahu terakhir, hubungan Mesir dengan Israel tidak mengalami eskalasi. Kendati perjanjian Camp David sangat efektif dalam membentuk

³⁷ Ephraim Dowek. *Nevertheless Peace, dalam The Legacy of Camp David*, (Washington DC: The Middle East Institute, tahun 1979-2009). Hal. 22

³⁸ *Ibid.* hal. 25

loyalitas pihak-pihak terkait, ada hal-hal umum yang menjadi pertanyaan besar.

Apa yang terjadi ketika rezim Mubarak selesai atau *mediate successor* tidak lagi memiliki peranan penting dalam pemerintahan? *Triangular relationship* yang sudah terjalin akan meningkat atau sebaliknya?³⁹

Tidak dapat dielakkan, Arab Spring memberikan implikasi yang kuat terhadap eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah. Rangkaian peristiwa politik yang terjadi sekaligus menjadikan kawasan tersebut mengalami degradasi dalam hal keamanan dan stabilitas politik. Dalam sudut pandang Israel, *Arab Spring* merupakan sebuah ancaman khususnya terkait perjanjian damai dengan Mesir dan tensi konflik di Semenanjung Sinai yang seringkali menjadi sumber friksi setelah rangkaian *Arab Spring*.⁴⁰ Kenaikan tensi konflik dan ketegangan politik di kawasan Timur Tengah menempatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berseberangan (dalam konteks pembahasan ini adalah Palestina dan Israel) mengalami situasi yang cukup kompleks.

Setelah kejatuhan Mubarak, Mesir merupakan sebuah ancaman pragmatis bagi Israel. Penurunan Mubarak dan kenaikan Mursi Mesir membawa iklim baru dalam konteks regional. Perubahan tipikal pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan Mesir membawa serangkaian pembaharuan tentang konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, kondisi internal Mesir yang jauh dari stabil baik secara ekonomi, politik dan keamanan setelah peristiwa 2011, adalah sebuah gambaran paradoks yang nyata ketika Mesir menjadi cukup

³⁹ *Ibid.* hal. 24

⁴⁰ Yoel Guzansky dan Mark A. Heller, *One Year of The Arab Spring: Global and Regional Implications*. (The Institute For National Security Studies. Memorandum No. 113. Tahun 2011). Hal.40

berpengaruh di kawasan regional. Kelemahan dan kompleksitas internal yang dihadapi Mesir dibuktikan dengan kekuatan yang dibangun melalui kawasan regional.⁴¹ Kekuatan baru Mesir adalah sebuah bentuk dari kekuatan ideologi yang menjadi tipikal perubahan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Kelemahan Mesir di kawasan regional sejak beberapa dekade terakhir merupakan bentuk dari stagnasi ideologi dan lebih memilih zona-zona aman dalam membentuk kebijakan.

Ketegangan antara kelompok Fatah dan Hamas di jalur Gaza tahun 2012 melibatkan Mesir sebagai pihak mediator. Ideologi muslim yang melatarbelakangi sosok pemimpin baru Mesir memberikan harapan baru bagi kelompok Hamas untuk mendapatkan patronasi dari Mesir.⁴²

Setelah kemunduran rezim Mubarak, kawasan Semenanjung Sinai mengalami degradasi keamanan yang disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas dan organisasi terorisme yang melakukan serangan kepada masyarakat Israel, Mesir, dan warga Asing. Pelaku criminal dan organisasi teroris beroperasi di Semenanjung Sinai melakukan pengeboman terhadap saluran pipa gas dan penggerebekan terhadap beberapa *resort* di kawasan tersebut. 18 Agustus 2011 terjadi insiden mengenai sejumlah tahanan teroris yang melintasi Semenanjung Sinai untuk menuju Israel melakukan serangan kepada sejumlah warga sipil dan petugas militer. Tercatat ada 8 korban yang terbunuh dan 31 lainnya mengalami cedera atas penyerangan tersebut. Dalam upaya penangkapan para pelaku, angkatan bersenjata Mesir dan Israel berhasil

⁴¹ *Ibid.* Hal. 41

⁴² *Ibid.* Hal. 41

menangkap 7 diantaranya. Akan tetapi dalam operasi tersebut, pesawat tempur Israel secara tidak sengaja mengalami sebuah kesalahan yang berakibat menewaskan lima orang anggota perwira polisi Mesir.⁴³ Kejadian tersebut menjadi faktor yang mengawali terbentuknya tensi ketegangan antara Mesir dan Israel. Sedangkan kondisi politik Mesir pasca 2011 membuka peluang besar untuk melakukan peralihan orientasi politik yang lebih berihak kepada Palestina.

Potensi kenaikan tensi antara Mesir dan Israel tersebut yang secara rasional menjadi salah satu faktor peningkatan pasukan keamanan di wilayah Semenanjung Sinai oleh Mesir. Di sisi lain, kesepakatan perjanjian damai antara Mesir-Israel memberikan aturan khusus mengenai pembatasan jumlah personel yang melakukan pengamanan di kawasan Semenanjung Sinai.⁴⁴

4.2.1 Sikap Mesir di Masa Kepemimpinan Mubarak

Kebijakan luar negeri Mesir dalam menanggapi konflik Israel-Palestina telah bergeser secara bertahap. Nasser melihat konflik Israel-Palestina sebagai sebuah ancaman regional. Sehingga Palestina adalah bagian dari agenda keamanan nasional Mesir yang penting untuk dipertahankan. Sikap Mesir yang begitu kuat terhadap Palestina pada

⁴³ Jeremy M. Sharp, *Egypt in Transition*, (Congressional Research Service . Tahun 2012). Hal.6

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 6

akhirnya begeser menjadi pasif setelah penandatanganan perjanjian damai Camp David oleh preside Anwar Sadat.⁴⁵

Preferensi politik Mubarak adalah cenderung keluar regional. Dalam melihat perselisihan antara Israel-Palestina, Mubarak memilih peran strategis melalui keterlibatannya di forum-forum internasional untuk memelopori dan mempromosikan perdamaian di kawasan. merupakan jaminan bagi eksistensi Israel di level regional. Karenanya, Mesir memiliki stagnasi politik dalam level regional. Sebaliknya dalam level internasional, Mesir adalah mitra strategis bagi banyak pihak untuk menciptakan kerjasama terkait *regional security* maupun ekonomi.⁴⁶

Perjanjian damai Camp David menuntut komitmen Mesir, AS, dan Israel dalam jangka panjang. Mubarak dianggap sangat kooperatif karena dapat menjaga kontiyuitas Camp David dengan sangat baik. Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Mesir, AS, dan Israel. Karena loyalitas Mubarak tersebut, citra Mesir di internasional adalah sebagai negara yang kooperatif dan memiliki peranan besar dalam menjaga stabilitas regional.⁴⁷

4.2.2 Sikap Mesir di Masa Kepemimpinan Mursi

Penggulingan Mubarak memiliki implikasi besar terhadap gerakan PLO (Palestine Liberation Organization's), karena kedekatan Fatah dengan

⁴⁵ Ghassan Shabaneh, *Egypt and Syria's Effect on The Israeli-Palestinian Conflict*. (Report to Al Jazeera Center for Studies, 2013). Hal. 2

⁴⁶ Erric Fillinger, *Mubarak Matters: The Foreign policy of Egypt under Hosni Mubarak*. (School of International service American University. 2009). Hal.4

⁴⁷ *Ibid.* hal. 12

rezim Mubarak merupakan salah satu cara yang dianggap kooperatif bagi kelompok Fatah untuk mencapai misinya.⁴⁸

Perubahan orientasi politik Mesir terkait konflik Israel-Palestina yang terjadi pada era Mursi merupakan hal yang dapat diprediksi oleh banyak pihak. Kendati demikian, pembahasan mengenai perubahan tersebut menjadi pembahasan yang menarik khususnya bagi penstudi hubungan internasional dan kawasan Timur Tengah.⁴⁹

Sejak kenaikan Mursi, hubungan antara Mesir dan Gaza meningkat. Terlebih Hamas yang memiliki keterbatasan sejak rezim Mubarak, secara khusus memiliki kesempatan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Mesir di bawah Mursi. Secara simbolis kenaikan harmonisasi Mesir-Gaza dilakukan melalui kunjungan Perdana Menteri Hesham Kandil dengan membawa statement resmi Mursi bahwa agresi yang dilakukan Israel adalah sebuah aksi yang tidak bertanggung jawab.⁵⁰

Aktivitas jalur Rafah juga mengalami kenaikan secara signifikan. Data menunjukkan selama enam bulan terakhir di tahun 2010, jumlah perjalanan yang melintasi jalur Rafah tercatat ada sekitar 19.800 setiap bulannya, sedangkan memasuki lima bulan awal tahun 2012 mengalami

⁴⁸ Ghassan Shabaneh. *Op. cit.* hal. 3

⁴⁹ Glen Segell, *Mohamed Morsi, Egypt, and Israel.* (E-International Relation, 2013) . Hal. 2

⁵⁰ Dan Bradley Swale, *Discord in The Desert: Egypt's Sinai Peninsula in the aftermath of the Arab Spring.* A Thesis of Defence and Strategic Studies. (Manawatu, New Zeland :Massey University,. 2015).Hal.70

kenaikan rata-rata menjadi 31.600 setiap bulan. Lebih lanjut setelah itu Mursi melakukan pembukaan jalur Rafah secara resmi.⁵¹

Pembukaan jalur Rafah disambut antusias oleh Hamas dengan menutup terowongan dan menggunakan Rafah sebagai sarana untuk melakukan aktivitas yang melibatkan perpindahan seperti perdagangan, dan lain-lain yang di tujuikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Lebih jauh, Mursi mengakui bahwa deprivasi ekonomi yang dialami oleh kelompok Badui Sinai menjadi salah satu faktor naiknya instabilitas di Semenanjung Sinai. Karenanya keputusan Mursi dalam pembukaan Rafah dan upaya penutupan terowongan dimaksudkan untuk mengurangi angka kriminalitas dan mencari solusi lain untuk memberikan pekerjaan secara legal kepada penduduk Badui Sinai. Penutupan terowongan dilakukan dengan menggunakan alat berat dan metode ledakan, ada 250 terowongan yang berhasil di tutup tahun 2012, dan 794 terowongan ditutup oleh militer di tahun 2013.⁵²

Setelah pembukan jalur Rafah, kompleksitas keamanan di Semenanjung tidak selesai begitu saja. Sejumlah serangan oleh kelompok militan terjadi pada 5 Agustus 2012 waktu petang, yang mengakibatkan enam belas pasukan penjaga dari Mesir tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Pihak Israel melihat kejadian tersebut sebagai sebuah potensi kegagalan dini hubungan bilateral Mesir dengan Hamas. Di sisi lain, secara cepat setelah kejadian tersebut Hamas menyatakan aksi solidaritas kepada Mesir

⁵¹ *Ibid.* hal 78

⁵² *Ibid.* hal 71

sekaligus menyampaikan bahwa Hamas tidak memiliki keterlibatan terkait serangan yang terjadi. Penyangkalan dilakukan melalui statement Hamas bahwa Hamas sangat menghargai keamanan nasional Mesir dan tidak akan menggunakan senjata untuk melawan dan menyerang tentara Mesir.⁵³

Melalui perspektif Mursi, Insiden tersebut adalah bentuk kegagalan Militer dan Intelijen Mesir dalam menjaga keamanan nasional. Selanjutnya Mursi mengambil tindakan untuk mencopot jabatan Murad Muwafi selaku Direktur Intelijen Mesir sekaligus Gubernur wilayah Sinai Utara, dan beberapa pejabat intelijen lainnya. Beberapa hari kemudian, Marshal Mohammad Husein Tantawi selaku petinggi Dewan Militer juga diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Abdul Fattah al-Sisi yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir.⁵⁴

⁵³ *Ibid.* hal 73

⁵⁴ *Egypt leader Mursi orders army chief Tantawi to resign* dalam Dan Bradley Swale, *Discord in The Desert: Egypt's Sinai Peninsula in the aftermath of the Arab Spring*. A Thesis of Defence and Strategic Studies.(Manawatu, New Zeland: Massey University), 2015. Hal.74

BAB V PEMBAHASAN

Merujuk pada teori kebijakan luar negeri oleh Rosenau¹ penulis menggunakan model adaptif kebijakan luar negeri (lihat Gambar.1) yang digunakan penulis sebagai alat untuk menjawab dari rumusan masalah dan melakukan penjabaran di bab pembahasan ini. Sesuai dengan model yang digunakan penulis tersebut, ada tiga hal yang secara umum dipetakan sebagai konsekuensi kebijakan luar negeri Mesir atas dasar perubahan-perubahan baik secara internal, eksternal, dan kepemimpinan. Kebijakan luar negeri Mesir dalam merespon konflik Israel-Palestina masuk dalam konteks eksternal. Kendati demikian bukan berarti lepas dari faktor-faktor internal sebagai bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan.

Faktor-faktor internal dan eksternal dalam bab ini adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan para rezim sebelumnya yang menuntut penyesuaian bagi kepemimpinan selanjutnya untuk mengakumulasi situasi yang ada dan mengkonversikan ke dalam pilihan-pilihan yang dianggap rasional oleh pemimpin baru.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Rosenau, penulis mengidentifikasi tiga determinan utama yang melingkupi kebijakan luar negeri Mesir. Berikut analisa secara komprehensif dari determinan-determinan yang dimaksud:

¹ James N. Rosenau. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. (New York: Nichols Publishing, 1981). Hal. 42

5.1 *External Change*

Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Mesir dapat dilihat dari lingkungan regional dan Internasional. Dalam struktur internasional, Mesir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pola aliansi dan kerjasama yang dilakukan Mesir di bawah kepemimpinan Mursi menunjukkan stagnasi karena adanya kesepakatan-kesepakatan yang telah dijalin oleh pendahulunya. Bentuk-bentuk kerjasama yang mendasari kesepakatan-kesepakatan tersebut memiliki orientasi waktu jangka panjang. Secara ideologi, Mursi memiliki orientasi politik yang sangat berbeda dari rezim sebelumnya, tetapi karena adanya konsekuensi-konsekuensi tekanan dari struktur sistem internasional maka tidak terjadi perubahan signifikan di dalamnya. Berbeda jika perspektif dipersempit ke dalam kawasan regional saja, maka arah perubahan politik luar negeri Mursi dapat dipetakan secara jelas melalui pola-pola aliansi baru yang dibentuk. Berikut gambaran geopolitik dan geostrategi Mesir sebagai bentuk pemahaman dasar dalam melihat Mesir secara politik.

5.1.1 Mesir dalam Kawasan Timur Tengah dan Struktur Sistem

Internasional

Asia, Afrika, Laut Tengah, Laut Merah, Timur Tengah, dan Sungai

Nil merupakan keseluruhan entitas geografis di mana Mesir adalah bagian dari keseluruhan entitas tersebut. Posisi tersebut menempatkan Mesir di antara dua benua dan beberapa wilayah geopolitik. Dari perspektif maritime,

Mesir dikelilingi oleh Laut Tengah dan Laut Merah sehingga posisinya menjadi pemegang persimpangan/ poros penting bagi akses beberapa negara dan benua, termasuk akses menuju India dan Samudera Atlantik melalui Terusan Suez. Peranan Sungai Nil juga tidak kalah besarnya bagi Mesir sebagai sumber daya yang menunjang akses ekonomi negara dan peradaban masyarakatnya.²

Secara geopolitik, Mesir mendapatkan keuntungan strategis salah satunya sebagai transit utama jalur perdagangan karena berbatasan langsung Afrika Utara, Libya di sebelah Barat, Sudan di sepanjang Laut Merah, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Israel dan jalur Gaza. Atas dasar pertimbangan geopolitik, dalam konteks Israel dan Gaza, Mesir menjadi negara yang dipercaya oleh Amerika Serikat sebagai pemegang kunci stabilitas regional melalui perjanjian damai.³

Keuntungan juga didapat dari Terusan Suez yang memegang peranan penting sebagai pusat pelayaran dan lalu lintas perdagangan internasional, khususnya sebagai perlintasan kapal-kapal eksportir minyak bumi.⁴ Amerika Serikat juga memiliki kepentingan besar terhadap Terusan Suez sebagai sarana mobilitas perlengkapan militer ke beberapa wilayah seperti Afrika, samudera Hindia, dan Teluk Persia. Secara garis besar, Mesir

² Abdelhak Bassou. *The geopolitics of Egypt: Strength, Opportunities, Constraints and Vulnerabilities*. (Policy Brief, Juni 2016). Hal. 1

³ Brian Katulis. *Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S Policy that Balances Regional Security with Support for Egyptian Political and Economic Reforms*. (Center For American Progress, 2012). Hal.16

⁴ Arik Segal. *Egypt Uprising: Implications for Regional Security*. [online] tersedia dalam: www.culturaldiplomacy.org, (diakses pada tanggal 19 Mei 2017)

memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah.⁵

Dari gambaran wilayah dan posisi di atas, Mesir berada dalam situasi yang berpotensi mendapat keuntungan dan kesulitan yang sama besarnya.

Keuntungannya Mesir dapat mengambil peran sebagai meeting point dari hubungan antar negara yang terjalin karena ditunjang dari nilai strategis yang dimilikinya. Sedangkan kesulitannya adalah negara-negara sekitar Mesir banyak yang memiliki kontadiksi dan perbedaan dari kepentingan masing-masing negara. Sehingga pembentuka aliansi dengan satu negara tertentu dapat diinterpretasikan sebagai ancaman bagi negara lainnya. Tantangan bagi Mesir sendiri adalah kemampuan untuk menyeimbangkan kebijakannya di tengah keberagaman mitra dan geopolitik yang mengelilinginya.⁶

Peta kedekatan Mesir menjelang 2011 cenderung keluar dari regional. Kedekatan yang dijalin dengan Amerika Serikat dan negara negara lain di Eropa memberikan konsekuensi pada eksistensi Mesir di kawasan Timur Tengah yang secara politik melemah. Setelah penandatanganan perjanjian damai tahun 1978 oleh presiden Anwar Sadat yang dianggap sebagai pelopor perdamaian regional di mata internasional, di sisi lain mengundang respon yang sebaliknya dari perspektif regional. Sebagai konsekuensinya setelah penandatanganan perjanjian damai tersebut Mesir dikeluarkan dari Liga Arab serta embargo ekonomi. Markas pusat Liga Arab

⁵ *Ibid.* hal. 2

⁶ Abdelhak Bassou. *Op. Cit.* Hal. 2

yang pada awalnya berada di kairo dipindahkan ke Tunis. Berbagai bantuan dari negara-negara Arab dihentikan. Hal tersebut sebagai bentuk pengucilan Dunia Arab kepada Mesir karena dianggap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kesepakatan antar-Arab yang dalam kesepakatan tersebut hanya menerima perdamaian secara menyeluruh (*comprehensive peace*), sedangkan perjanjian damai dengan Israel dianggap sebagai bentuk (*separate peace*) dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal bersama Liga Arab.⁷

Sejak saat itu Mesir mengalami stagnasi di level Regional. Kepentingan ekonomi dan militer nasional dipenuhi dengan pembuktian loyalitas Mesir kepada Amerika Serikat. Setelah pergantian pemimpin ke Mursi, Mesir baru menunjukkan upaya untuk mengembalikan *bargaining*-nya di level regional.⁸

Setelah 2011, lingkungan geostrategi Mesir mengalami penurunan terlebih posisinya dikeliling oleh *dysfunctional states* seperti Libya, Sudan, dan seluruh Arab Mashriq yang terdiri dari Irak, Suriah, Lebanon dan Palestina. Kondisi tersebut secara dramatis meningkatkan status Mesir sebagai negara yang rentan terhadap aktivitas terlarang seperti penyelundupan senjata dari hampir segala arah yang mungkin terjadi.⁹

⁷ Victor Lavy. *The Economic Embargo of Egypt by Arab States: Myth and Reality*. Middle East Journal 38, No.3. 1984. Hal.420, dalam Dan Bradley Swale. *Discord in the Desert: Egypt's Sinai Peninsula in the aftermath of the Arab Spring*. 2015. Hal. 46

⁸ Dan Bradley Swale, *Op. Cit.* Hal. 47

⁹ Abdel Monem said Aly. *Post Revolution Egyptian Foreign Policy*. (Crown Center for Middle East Studies.No. 86. November 2014). Hal. 3

5.1.2 Pola Aliansi

a. Regional

Di bawah kepemimpinan Mursi, Mesir menunjukkan upaya pembentukan Aliansi baru di tingkat regional. Aliansi yang dibentuk Mursi lebih bersifat ideologis. Kendati perubahan pola aliansi regional bukan hal pertama kali bagi Mesir. karena jika dilihat ke belakang, sebelum penandatanganan perjanjian damai Camp David, sikap Mesir terhadap Israel cenderung konfrontatif. Yang kemudian Melalui Presiden Sadat, Mesir menunjukkan sikap yang mengejutkan banyak pihak khususnya negara-negara Arab mengenai sikap Mesir yang menjadi negosiatifnya dengan pihak Israel melalui perjanjian damai.¹⁰

Dua hal penting yang menjadi penanda perubahan pola aliansi Mesir yaitu dibukanya kembali hubungan diplomasi dengan Iran dan kenaikan hubungan dengan kelompok Hamas, termasuk di dalamnya gagasan Mesir dalam melakukan mediasi antara Palestina-Israel yang sempat mengalami kenaikan eskalasi konflik pada November 2012.¹¹

Dalam perspektif Iran, Arab Spring khususnya yang terjadi pada Mesir dianggap sebagai momentum untuk meningkatkan *Balance of Power* di kawasan Timur Tengah. Kekalahan Mubarak yang *notabene*nya sebagai oposisi Iran terbesar di kawasan , merupakan kesempatan emas untuk

¹⁰ Garetta Nada, *Iran-Egypt: Prospect of a New Alliance?* [daring] (United States Institute Of Peace, 11 Januari 2013) tersedia dalam: <http://iranprimer.usip.org/discussion/2013/jan/11/iran-egypt-prospects-new-alliance> diakses pada: 05-06-2017

¹¹ Azzura Meringolo. *From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy*. (Insight Egypt. No.8. Maret 2015). Hal. 3

mengubah preferensi politik yang selama ini pasif dengan Mesir. Sebagai bentuk *welcome* atas ergantian rezim di mesir, Iran adalah negara yang pertama kali menyambut kemenangan Mursi dalam pemilu 2012. Baginya, kenaikan Mursi adalah era baru untuk kebangkitan Islam di Timur Tengah.¹²

Di sisi lain, hingga jatuhnya rezim Mubarak, Mesir melihat bahwa naiknya iklim politik yang berhubungan dengan islam sebagai agama dan kultur mayoritas adalah sebuah ancaman terhadap eksistensi pemerintahan, khususnya pemerintahan Mubarak, yang erat dikaitkan sebagai poros dari kepemimpinan yang anti-Iran. Selama 30 tahun terakhir, hubungan diplomatik Iran dan Mesir memiliki citra yang buruk.¹³

Mursi dan elemen politiknya dalam pemerintahan Mesir melihat fenomena hubungan diplomatik tersebut sebagai suatu hal yang tidak wajar. Hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari subordinasi kepentingan nasional Mesir kepada pihak luar. Argumen yang merujuk pada perbaikan hubungan diplomatik Mesir-Iran tersebut dikuatkan dengan keputusan lanjutan Mursi yang mulai menggandeng Iran untuk menggalang kekuatan regional. Bentuk nyata perbaikan hubungan tersebut seperti diizinkannya kapal-kapal militer Iran ketika melewati Terusan Suez dalam perjalanannya menuju Mediterania. Terlebih kunjungan bilateral yang sebelumnya dilakukan Mursi juga mendapat sambutan baik dari Iran. Kedua belah pihak menunjukkan antusiasme dalam memperbaiki kebekuan politik yang telah

¹² Berdasarkan *statement* Menlu Iran, Ali Akhbar Salehi saat menanggapi pemilu Mesir, dalam Shlomo Broom dan Yoel Guzansky. *Egypt and Iran: Will the Two Walk Together?*. (INSS Insight. No. 353. Juli 2012.) Hal.1

¹³ Shlomo Broom dan Yoel Guzansky. *Egypt and Iran: Will the Two Walk Together?*. (INSS Insight. Juli 2012. No. 353). Hal.1

berlangsung lama.¹⁴ Pemulihan hubungan bilateral dengan Iran dipetakan Mursi sebagai bentuk akumulasi kekuatan yang memiliki kesamaan secara ideologi.

b. Internasional

Pada level ini, sikap internasional Mesir tidak cukup jika dilihat hanya melalui perspektif ideologi atau dominasi Ikhwanul Muslimin.

Apabila dalam skala regional Mesir menunjukkan upaya dalam meningkatkan power negara melalui strategi yang bersifat ideologis, maka dalam konteks internasional Mursi lebih dihadapkan pada situasi yang kompleks dan menuntutnya untuk mengambil sikap rasional. Mesir dalam struktur internasional memiliki posisi yang sudah berakar kuat sejak peninggalan rezim Mubarak. Tidak mudah bagi Mursi untuk menentukan arah kerjasama dan pola aliansi sesuai dengan ideologi yang melatarbelakanginya. Hal tersebut terlihat dari keputusan Mursi untuk memilih menjaga kesepakatan dengan aliansi-aliansi yang sudah ada sebelum Ia menjabat sebagai presiden. Hal yang paling jelas adalah sikap Mursi terhadap kontinuitas perjanjian damai Camp David. Kendati kebijakan dalam level regional khususnya tentang indikasi kedekatan dengan Hamas dan Palestina merupakan isu yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel.¹⁵

Stagnasi Mesir dalam level internasional disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan tekanan yang dihadapinya.

¹⁴ *Ibid.* hal. 1

¹⁵ *Ibid.* hal. 2

Berbicara mengenai struktur sistem internasional, Amerika Serikat merupakan great power yang posisinya tidak tergeser baik sebelum 2011 maupun sesudahnya. Secara historis Mesir merupakan mitra penting bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat di regional Timur Tengah.

Hubungan bilateral kedua belah pihak sudah terjalin dalam waktu lama, sejak Mesir masih sebagai negara Monarki hingga era Naser (1947-1967) terhutang sekitar \$1 milyar asistensi ekonomi yang diberikan AS kepada Mesir, sebelum kemudian hubungan bilateral keduanya mengalami kerenggangan yang mengakibatkan AS membekukan asistensinya selama beberapa waktu kemudian. Memasuki era Mubarak, hubungan bilateral Mesir dengan AS dapat dikatakan sangat harmonis. Keduanya saling menjaga kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk. AS mendapat keuntungan politik berupa jaminan keamanan di wilayah Timur Tengah, dan Mesir mendapat surplus besar dari asistensi ekonomi yang didapat setiap tahunnya dari AS.¹⁶

Mesir mengalami pergeseran politik setelah dipimpin oleh Mursi. Meski sejumlah pengamat memprediksi bahwa hubungan bilateral Mesir dengan Amerika Serikat akan mengalami kemunduran terkait ideologi dan preferensi politik yang diambil Mursi, tetapi pada kenyataannya hubungan bilateral Mesir dengan Amerika sangat kuat. Ketika Mursi menunjukkan orientasi untuk mengurangi atau menghilangkan dependensi Mesir terhadap AS maka sebagai konsekuensinya adalah kompleksitas khususnya dalam

¹⁶ Amy Hawthorne, *Rethinking U.S Economic Aid to Egypt*. (Project on Middle East Democracy. 2016). Hal. 6

hal ekonomi, terlebih kondisi ekonomi Mesir setelah 2011 berada dalam situasi krisis. Asistensi ekonomi AS menjadi penting mengingat degradasi ekonomi yang dihadapi Mesir. Di sisi lain, Mursi ingin menunjukkan perubahan orientasi untuk tidak lagi menjadi subordinasi kepetingan AS.¹⁷

Konsekuensi yang dihadapi Mursi dalam hal hubungan bilateral dengan AS adalah posisi yang kompleks dan dilematis.

Dalam sudut pandang AS, turunnya Mubarak adalah hilangnya salah satu mitra politik yang menjamin kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Transisi kepemimpinan oleh SCAF dalam kurun waktu 16 bulan, dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas hubungan diplomatik dengan AS dan menunjukkan transisi pemerintahan yang *smooth* seperti yang diharapkan rakyat Mesir.¹⁸

Kendati AS memiliki power yang kuat terhadap Mesir melalui konsistensi perjanjian damai Camp David dan beberapa kerjasama lainnya, bukan berarti transisi pemerintahan ke Mursi adalah hal yang tidak penting. AS menyadari potensi yang mengancam hubungan bilateralnya dengan Mesir. Setelah pelantikan Mursi 30 Juni 2012, beberapa hari kemudian AS mengirimkan delegasinya yaitu Hilary Clinton dan Leon Panetta ke Mesir untuk menyatakan selamat dan dukungan yang diberikan kepada Mursi serta

¹⁷ Gregory Aftandilian. *Dilemmas For US Strategy Pitfalls in Egypt*. (Strategic Studies Institute and U.S Army War College Press, April 2013) . Hal. 7-8

*Aftandilan adalah konsultan swasta dan penulis yang telah bekerja selama 21 tahun sebagai analis Kawasan Timur Tengah di *Departments of State and Defense*, sekaligus sebagai advisor kebijakan luar negeri di kongres.

¹⁸ *Ibid.* hal 9

pernyataan yang meyakinkan bahwa hubungan Bilateral Mesir dan AS akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Mursi.¹⁹

Brian Katulis dalam *Managing Change in Egypt* menjelaskan bahwa, AS menyadari potensi melemahnya pengaruh yang dimiliki di Mesir karena beberapa hal seperti, ketegasan pemimpin baru Mesir, meluasnya opini publik tentang anti-amerika setelah 2011, serta beberapa isu nasional yang sedang dihadapi AS sendiri. Lebih lanjut, tantangan utama AS adalah cara untuk menyesuaikan dengan perubahan struktural terkait pergantian pemimpin Mesir. Konsekuensinya adalah, AS dihadapkan pada sikap untuk meningkatkan komitmen dalam mengintegrasikan aspek keamanan, diplomatik, dan kebijakan ekonomi kepada Mesir secara lebih hati-hati.²⁰

Bentuk komitmen AS dalam menghadapi konsekuensi perubahan di Mesir agar hubungan bilateral dan *regional security* tetap terjaga adalah dengan strategi loyalitas berupa dukungan dari berbagai aspek untuk membantu Mesir menuju transisi demokrasi dan mencapai stabilitas nasional. Dukungan dalam hal demokratisasi, AS menggandeng aliansi pelopor demokrasi, Uni Eropa.²¹

5.2 Structural Change

¹⁹ *Ibid.* Hal. 9

²⁰ Brian Katulis. *Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S Policy that Balances Regional Security with Support for Egyptian Political and Economic Reforms.* (Center For American Progress. 2012). Hal. 28

²¹ *Ibid.* hal. 28

Ada dua jenis *Structural change (internal change)* yang berhasil dipetakan oleh penulis terkait relevansi data dan kondisi dalam studi kasus pada penelitian ini yaitu *societal source* dan *governmental source*. Berikut pembahasan dari aspek internal yang dapat dipetakan oleh penulis.

5.2.1 Societal Source

a. Economic Development

Kondisi ekonomi Mesir menjelang 2011 menunjukkan adanya hal yang bersifat kontradiktif apabila dilihat melalui data tertulis dan kondisi faktual. Secara tertulis Mesir menunjukkan kenaikan GDP sebesar 7% (lihat Gambar.2). Kenaikan GDP Mesir tersebut dianggap sebagai hal yang kontradiktif mengingat pecahnya aksi masyarakat Mesir pada Januari 2011 dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi kalangan kelas bawah. Asistensi ekonomi oleh Amerika Serikat dianggap tidak mampu meresap pada lapisan bawah masyarakat, terlebih sebesar 2/3 dari jumlah asistensi ekonomi digunakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas militer dalam negeri.

Pasca Januari 2011 ekonomi Mesir terus mengalami degradasi. Semua kegiatan ekonomi khususnya sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan dan lapangan kerja utama Mesir mengalami penurunan tajam. Sebagai implikasinya, pertumbuhan domestic bruto (PDB) menurun dari 5,1% pada 2009/2010 menjadi 2% di 2011, sementara cadangan devisa juga mengalami kemerosotan dari \$36 miliar di tahun 2011 sebelum kenaikan iklim politik, menjadi \$14,9 miliar pada

akhir Juni 2013.²² Karena keterpurukan ekonomi tersebut, Mesir mengalami defisit serta meningkatnya hutang luar negeri. Pemerintahan pasca Mubarak mengandalkan bantuan asing untuk menyelesaikan degradasi ekonomi dalam negeri.²³

Dari gambaran ekonomi Mesir menjelang hingga setelah peristiwa 2011, maka hal tersebut menjadi salah satu kontribusi kompleksitas bagi pemimpin terpilih setelah Mubarak untuk mencari solusi dengan membentuk kebijakan secara rasional, khususnya kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan negara-negara yang menjadi mitra Mesir dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Faktor ini yang menjadi salah satu alasan atas stagnasi Mesir dalam struktur internasional terkait aliansi dan hubungan/kerjasama yang dimiliki.

b. Moods of Opinion

Pembahasan tentang peristiwa 2011 di Mesir beserta konsekuensi-konsekuensi yang menyertai cenderung bersifat *high politic*. Pada perspektif yang lebih luas, isu-isu *high politic* yang menyertai dilengkapi dengan isu-isu *low politic* sebagai upaya untuk mendapatkan analisa yang matang dan komprehensif. Salah satu hal yang bersifat *low politic* dan tidak kalah penting ketika melakukan analisa dalam penelitian ini adalah opini publik. Demonstrasi masa yang berlarut-larut di tahun 2011, selain memuat tuntutan terhadap perbaikan berbagai sektor (politik, ekonomi,

²² Maria Cristina Paciello. *Economic and Social Policies in Post-Mubarak Egypt*. (Insight Egypt. No. 3 November 2013). Hal 1

²³ *Ibid.* hal. 2

sosial, keamanan) juga dilatarbelakangi oleh opini publik yang didukung melalui akses sosial media.²⁴

Tuntutan masyarakat mengenai perubahan sistem pemerintahan dari otoriter menjadi demokrasi tidak lepas dari harapan atas kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Transisi demokrasi Mesir yang diwarnai aksi unjuk rasa hampir setiap hari di sisi lain merupakan bentuk euphoria masyarakat Mesir menyambut hak dalam kebebasan berpendapat. Sedangkan dalam perspektif pemerintah, hal tersebut menjadi bagian dari sejumlah kompleksitas yang belum mampu diuraikan satu-persatu.²⁵

5.2.2 Governmental Source

Pemerintah adalah salah satu faktor internal yang memiliki nilai strategis dalam pembentukan kebijakan. Periode 2012-2013 adalah masa transisi di berbagai sektor di Mesir termasuk disalamnya sektor pemerintahan. Peristiwa politik 2011 memuat salah satu tuntutan masyarakat untuk diselenggarakannya perubahan sistem pemerintahan menuju demokrasi yang utuh. Perubahan sistem pemerintahan diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan domestik, terutama aspek ekonomi. Sistem pemerintahan yang berjalan dianggap sebagai penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi lapisan bawah karena *top-down*

²⁴ Rasha Abdulla. *Egypt's Media In The Mids of Revolution* (Carnegie Endowment For International Peace, Juli 2014) hal. 3

²⁵ Ibid. hal.20

government memberi celah besar bagi koruptor di sistem pemerintahan.²⁶

Fase transisi demokrasi Mesir dianggap sebagai momen istimewa bagi masyarakatnya. Ada harapan-harapan politik yang direferensikan melalui kesatuan suara kepada kandidat-kandidat yang dianggap pantas dalam mengikuti pemilihan umum Mesir.

Sebelum 2011, secara umum sistem pemerintahan Mesir adalah terpusat (sentralisasi). Sistem administrasi lokal hanya bersifat administratif, yang berarti tidak mewakili fungsi struktural *local governance* secara menyeluruh.²⁷ Setelah Mubarak turun jabatan, struktur tertinggi pemerintahan Mesir diambil alih oleh Dewan Militer (SCAF) sampai Mesir memperoleh presiden terpilih. Secara etik, SCAF dipercayakan untuk menjalankan masa transisi pemerintahan non-bias terhadap seluruh aktivitas masyarakat, parta politik, dan kelompok minoritas dengan cara bersikap adil untuk semua.²⁸

Masyarakat Mesir secara kooperatif mempercayakan proses transisi demokrasi sepenuhnya kepada SCAF. Proses transisi dimulai dengan referendum konstitusi pada Maret 2011, Deklarasi konstitusional oleh SCAF, pemilihan Majelis Rakyat (*Lower House*) pada bulan November hingga Desember 2011 (terlepas dari kenyataan bahwa Parlemen yang terbentuk secara resmi pada Januari 2011 yang kemudian dibubarkan oleh SCAF pada bulan Juni 2012 berdasarkan keputusan pengadilan

²⁶ Salwa Tobbala. *Local Governance and Democratization: The Roadmap for a Responsive Accountable Egypt*. A Tesis, (Cairo University: Faculty of Economics and Political Science –FEPS. September 2012). Hal. 4

²⁷ *Ibid.* hal. 16

²⁸ *Ibid.* hal. 17

inkonstitusionalitas pemilihan 1/3 anggota Parlemen), dilanjutkan dengan pemilihan Dewan Shura (*Upper House*) pada bulan Januari hingga Februari 2012, dan terakhir adalah diselenggarakannya Pemilu Presiden pada bulan Mei 2012.²⁹ Kendati demikian, proses transisi yang dilakukan oleh SCAF dianggap tidak sepenuhnya transparan sehingga problem sosial Mesir setelah Januari 2011, seperti chaos, demonstrasi, dan perilaku anarki masyarakat tidak dapat dibendung.³⁰

Sesuai data angka, transisi politik Mesir menunjukkan dominasi kelompok Islam di bangku parlemen, yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin melalui FJP sebesar 46,3% dan Partai An Nour (salafi) sebesar 24,4%. Puncak transisi politik pada tanggal 30 Juni 2012 dengan terpilihnya Mursi sebagai Presiden Mesir.³¹ Demokratisasi Mesir adalah tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan karena selama lebih dari 60 tahun terbiasa dengan sistem otoriter diktator di bawah pengawasan ketat militer. Melalui sudut pandang spesifik, tantangan utama dalam masa transisi Mesir adalah penyelarasan kelompok Islam dan sekuler dalam kubu pemerintahan yang rentan terhadap perbedaan pandangan.

5.3 Leadership

Muhammad Mursi berasal dari desa al-Adwah provinsi al-Syarqiyah.

Orangtua berprofesi sebagai petani. Kultur religius terbentuk sejak di

²⁹ *Ibid.* hal. 17

³⁰ *Ibid.* hal. 18

³¹ *Ibid.* hal. 18

lingkungan keluarga sebelum Mursi menempuh pendidikan secara formal. Pendidikan dasar dilakukan di wilayah tempat tinggal, desa al-Adwah, sedangkan untuk pendidikan kelas menengah ditempuh sekitar empat kilometer dari tempat tinggal. Menduduki bangku SMA, Mursi telah hafal Al-Qur'an, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Kairo dengan mengambil keahlian teknik. Berkat kecerdasan akademik yang dimiliki, Mursi mendapat gelar *Cum Laude* ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1975. Setelah itu mengikuti program wajib militer di divisi II Infantri, bagian persenjataan kimia selama satu tahun. Setelah kembali dari wajib militer, ia melanjutkan pendidikan magister di universitas yang sama.³²

Tahun 1982 Mursi menyelesaikan program doktoral di *University of Southern California*, Amerika Serikat dan menjadi asisten professor hingga tahun 1985, lalu memutuskan untuk kembali ke Mesir dan menjadi dosen sekaligus sebagai kepala departemen teknik di Universitas Zagazig. Menjelang 2011, Mursi masih berprofesi sebagai akademisi di bidang teknik. Dan tanggal 18 Maret 2012 setelah menjabat sebagai presiden, ia mendapat gelar *Doctor Honoris Causa* dari *University of Science and Technology*, Pakistan.³³

Interaksi dengan Ikhwanul Muslimin sudah terbentuk sejak Mursi menempuh pendidikan tinggi, mengingat basis Ikhwanul Muslimin ada hampir di sebagian besar universitas di Mesir. Mursi termasuk anggota yang aktif

³² Bastoni, *Dr. Mursi yang hafal Al-Qur'an* dalam Linda Nur Ramly, *Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir*. (SOCIA Jurnal. Vol.12 No.2. September 2015). Hal. 75

³³ Waskito, *Air Mata Presiden Mursi*. dalam Linda Nur Ramly, *Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir*. (SOCIA Jurnal. Vol.12 No.2. September 2015). Hal.76

dalam kegiatan di organisasi tersebut.³⁴ Merasa memiliki ketertarikan secara khusus pada Ikhwanul Muslimin, Mursi memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut pada tahun 1977.³⁵

Dalam dasawarsa terakhir, Mursi merupakan figur penting di kelompok Ikhwanul Muslimin. Tahun 2000 hingga 2005 Mursi merupakan pemimpin blok parlemen Ikhwanul Muslimin di majelis rakyat dengan memegang kursi independen, karena eksistensi kelompok Ikhwanul Muslimin secara resmi dilarang di Mesir. Peran Mursi dalam parlemen tersebut dipandang sebagai sebuah prestasi bagi kalangan Ikhwanul Muslimin karena karakternya yang dianggap menonjol dan berpengaruh dalam memimpin blok parlemen.³⁶ Selama menjadi anggota majelis rakyat, Mursi aktif menyuarakan agar pemerintah melakukan reformasi politik, menyerukan pencabutan tindakan represif, termasuk undang-undang darurat yang memberi wewenang polisi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam jangka waktu lama tanpa proses hukum, serta kritik terhadap undang-undang yang membatasi pembentukan partai politik.³⁷

Secara politik, figur Mursi identik dengan oposisi pemerintah Mesir. hal tersebut dikuatkan dengan beberapa kali Ia menjadi tahanan atas aksi yang dilakukan. Pemilihan Mesir tahun 2005, menyebabkan Mursi ditangkap atas aksinya dalam memimpin sebuah demonstrasi mengenai kecurangan dalam

³⁴ *Ibid.* hal. 76

³⁵ Anonim. [online] tersedia dalam: <http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24731587.html>. (diakses pada 04-06-2017)

³⁶ Anonim. [online] tersedia dalam: <http://ikhwanweb.com/article.php?id=29964>. (Diakses pada 07-06-2017)

³⁷ Anonim [online] tersedia dalam: <https://www.britannica.com/biography/Mohammed-Morsi>. diakses pada 09-06-2017. Pukul 13.45 WIB

pemilihan Mesir.³⁸ Sebagai konsekuensinya, tanggal 18 Mei 2006 Mursi resmi ditahan bersama dengan 500 anggota Ikhwanul Muslimin lainnya yang sebelumnya juga terlibat dalam aksi demonstrasi besar-besaran di Kairo atas tindakan keras pemerintah terhadap hakim yang secara terbuka mengumumkan kecurangan oleh Partai Nasional Demokrat dalam pemilihan. Mursi dikenakan sanksi hukuman penjara selama 7 bulan lamanya. Januari 2011 Ia sempat menjadi tahanan kembali atas aksinya dalam demonstrasi Mesir 2011 bersama dengan 34 petinggi Ikhwanul Muslimin lainnya.³⁹

Figur Mursi yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin memberikan pengaruh besar terhadap cara pandangnya dalam membentuk kebijakan. Terlebih latar belakang politik yang mengantarkan Mursi menjadi Presiden adalah Ikhwanul Muslimin serta struktur pemerintahan Mesir yang didominasi oleh kelompok islam.

³⁸ Anonim. [online] tersedia dalam: <http://ikhwanweb.com/article.php?id=29964>. (Diakses pada 07-06-2017)

³⁹ Anonim. [online] tersedia dalam: <http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24731587.html>. (diakses pada 04-06-2017)

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Gejolak politik Mesir 2011 meninggalkan faktor-faktor dilematis yang menjadi agenda penyesuaian bagi kepemimpinan berikutnya. Kunci dari kompleksitas yang terjadi setelah 2011 hingga naiknya Mursi sebagai presiden adalah perubahan arah politik. Mubarak yang telah membangun politik Mesir secara detail dan matang sesuai preferensi dan kepentingannya dalam jangka waktu yang panjang, bukan merupakan hal mudah bagi Mursi untuk merubah dan mengkonversikan ke dalam agenda yang sesuai dengan pandangan politiknya.

Kebijakan-kebijakan Mursi mengalami benturan baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari faktor eksternal yang menonjol adalah *political change*. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan, *external political change* ditekankan pada level regional terkait perubahan sikap Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Pembukaan jalur Rafah dan jalinan kedekatan dengan kelompok Hamas menjadi indikator utama dari *external political change* yang terjadi selama kepemimpinan Mursi. Terlepas dari hal tersebut, dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Iran juga menjadi salah satu indikator penguat perubahan politik eksternal Mesir di bawah Mursi. Sedangkan dari faktor internal, terjadi perubahan yang sangat signifikan baik secara *internal personnel change* (pergantian pejabat pemerintahan yang dari sekuler menjadi didominasi oleh kelompok Islam, termasuk perubahan pemimpin/presiden),

internal political change (tingginya tuntutan masyarakat mengenai perubahan yang diinginkan seperti demokratisasi, perbaikan sektor ekonomi termasuk di dalamnya perluasan sektor lapangan kerja, serta isu keamanan internal yang dari ragam tuntutan tersebut harus dirasionalisasikan oleh Mursi) dan *socioeconomic change* (resesi ekonomi Mesir selama menjelang 2011 hingga selama masa jabatan Mursi sebagai Presiden Mesir).

Secara ideologi, Mesir berupaya untuk membentuk kebijakan luar negeri terkait konflik Israel-Palestina yang berpihak pada Palestina sebagai bentuk solidaritas Islam. Akan tetapi jika di lihat dari berbagai kompleksitas di atas serta pilar perjanjian damai Camp David yang sudah berakar kuat, maka pilihan-pilihan Mursi dalam membentuk kebijakan banyak mengalami benturan. Kapabilitas Mursi untuk merubah Mesir secara politik baik eksternal maupun internal tidak mutlak, selain karena hal-hal di atas, juga disebabkan adanya benturan dengan Dewan Militer yang masih melakukan intervensi dalam tubuh pemerintahan Mesir.

Jika dikonversikan ke dalam matriks tipe-tipe kondisi perubahan yang dikemukakan oleh Rosenau (lihat Gambar. 2) maka Mesir di periode 2012-2013 yang menjadi rentang waktu penelitian penulis adalah dalam kondisi perubahan tipe *spirited*. Kondisi perubahan internal yang terjadi sangat tinggi dan kondisi eksternal rendah. Tingginya tingkat perubahan internal memberikan konsekuensi berupa *political demands* kepada Mursi untuk bertindak secara cepat.

6.2 Saran

Penulisan yang dilakukan penulis ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Penulis melihat bahwa topik kebijakan luar negeri yang dijadikan dasar penulisan skripsi ini seharusnya bisa lebih menarik dengan melihat isu yang diangkat (Israel-Palestina) melalui perspektif yang lebih unik dan spesifik sehingga dapat memperkaya literasi dan analisa mengenai topik tersebut. Luasnya perspektif yang dipakai dalam penulisan ini sangat membuka celah terhadap kekurangan-kekurangan yang kemungkinan ditemui dalam penelitian ini. Karenanya, penulis mengharapkan adanya pengkhususan terhadap unit tertentu terkait topik yang diambil oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan

Dowek. Ephraim. 2009. *Nevertheless Peace, dalam The Legacy of Camp David*, Washington DC: The Middle East Institute.

Hinnebusch, Raymond & Anoushiravan Ehteshami. 2002. *The Foreign Policies of Middle East States*, Boulder: Lynne Rienner Publisher

Jensen, Lloyd. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Lovel, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Reinhart, and Winston Inc.

Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya

Perwira, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Plano, Jack C dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Abardin

Ricardo, David Akhmad. 2011. *Revolusi Mesir Revolusi Rakyat*. Jakarta: PT. Buku Kita

Rosenau, James N. 1981. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Swale, Dan Bradley. 2015. *Discord in The Desert: Egypt's Sinai Peninsula in the aftermath of the Arab Spring*. New Zeland: A Thesis of Defence and Strategic Studies. Massey University.

Tamburaka, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, Yogyakarta: NARASI.

Jurnal

Abdulla, Rasha. Egypt's Media In The Mids of Revolution. Carnegie Endowment For International Peace. Juli 2014.

Aftandilian, Gregory. Dilemmas For US Strategy: Pitfalls in Egypt. Tahun 2013.

Aftandilian, Gregory. Egypt's New Regime and The Future of The U.S-Egyptian Strategic Relationship. Strategic Studies Institute and U.S Army War College Press, April 2013.

AIPAC. Post-Mubarak Egypt Must Maintain Peace Treaty with Israel, Cooperation with United States, tahun 2011

Aly, Abdel Monem said. Post Revolution Egyptian Foreign Policy. Crown Center for Middle East Studies.No. 86. November, tahun 2014.

Amy Hawthorne, Rethinking U.S Economic Aid to Egypt. Project on Middle East Democracy, tahun 2016.

Anonim, Presidential Election in Egypt. Final Report May-June 2012, The Carter Center, Atlanta. Tahun 2012

Bassou, Abdelhak . The geopolitics of Egypt: Strength, Opportunities, Constraints and Vulnerabilities. Policy Brief. Edisi bulan Juni, tahun 2016.

Broom, Shlomo dan Yoel Guzansky. Egypt and Iran: Will the Two Walk Together?. INSS Insight. No. 353. Juli tahun 2012.

Brumberg, Daniel dan Hesham Sallam, The Politics of Security Sector Reform in Egypt . Special Report No. 318, United States Institute of Peace. Oktober, tahun 2012

Caleste, Maria Baranda. Post-Mubarak Egypt: Redefining its Role in The New Middle Eastern Balance of Power, INEGMA *Special Report* no. 14. April 2011

Fillinger, Eric. Mubarak Matters: The Foreign policy of Egypt under Hosni Mubarak. School of International service American University. Tahun 2009.

Guzansky, Yoel dan Mark A. Heller, One Year of The Arab Spring: Global and Regional Implications. The Institute For National Security Studies. Memorandum No. 113. Tahun 2011.

Hidriyah, Sita. Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No.13/I/P3DI/Juli/ Tahun 2012.

Katulis, Brian. Managing Change in Egypt: Advancing a New U.S Policy that Balances Regional Security with Supportfor Egyptian Political and Economic Reforms. Center For American Progress. Tahun 2012.

Lisbet. Krisis Politik di Mesir dan Posisi Indonesia, Info Singkat Hubungan Internasional. Vol.V.NO.14/II/P3DI/Juli/ Tahun 2013

Meringolo, Azzura. From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy. Insight Egypt. No.8. Maret, tahun 2015.

Meringolo, Azzurra, *From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at The Service of Domestic Policy*. Insight Egypt, No. 8, Maret 2015.

Ozkan, Mehmet. *Egypt Foreign Policy Under Muhamed Morsi*, Ortandogu Analiz, tahun 2013

Paciello, Maria Cristina. *Economic and Social Policies in Post-Mubarak Egypt*. Insight Egypt. No. 3 November, tahun 2013.

Ramly, Linda Nur dan RR. Tery Irenewati. *Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013)*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.12 No.2. September 2015,

Rosenau, James. *Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model*. Journal of Comparative Politics. Vol.2. No3. April Tahun 1970.

Segell, Glen. *Mohamed Morsi, Egypt, and Israel*. E-International Relation, tahun 2013.

Shabaneh, Ghassan. *Egypt and Syria's Effect on The Israeli-Palestinian Conflict*. Report to Al Jazeera Center for Studies, tahun 2013.

Sharnof, Michael. *Post Mubarak Egyptian Attitudes Towards Israel*, Foreign Policy Research Institute, tahun 2011

Sharp, Jeremy M. *Egypt Background and U.S Relations*, *Congressional Research Service*, tahun 2013

Sharp, Jeremy M. *Egypt in Transition*, Congressional Research Service . Tahun 2012.

Siddiqui, Fazzur Rahman. *Changing Countours of Egypt's Foreign Policy in The Aftermath of Uprising*. Indian Council of Word Affairs. 8 September 2016.

Tobbala, Salwa. *Local Governance and Democratization: The Roadmap for a Responsive Accountable Egypt*. FEPS Cairo University. September 2012

Waltz , Stephen M. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security by The MIT Press. Vol.9 No.4, 1985

Xuwen,Qian. *The January Revolution and The Future of Egypt*, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol.6, No.2, tahun 2012

E-Sources

Anonim. Tersedia dalam: <http://ikhwanweb.com/article.php?id=29964> (diakses pada 07 Juni 2017).

Anonim. Tersedia dalam: <http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24731587.html>. (diakses pada 04 Juni 2017)

Anonim. Tersedia dalam: <https://www.britannica.com/biography/Mohammed-Morsi>. (diakses pada 09-06-2017).

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/06/120616_parlemen_mesir_bar.shtml, (diakses pada 11 Mei 2017)

https://www.voanews.com/a/egypts_president_morsi_says_israeli_airstrikes_on_gaza_unacceptable/1547019.html (diakses pada tanggal 29 Juli 2017)

Kirkpatrick, David. D dan Mayy El Sheikh. With Gaza Attacks, Egypt's President Balances Hamas Against Israeli Peace. [daring] tersedia dalam: <http://www.nytimes.com/2012/11/16/world/middleeast/israels-gaza-strikes-test-egyptian-leader.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2017

Nada, Garetta. Iran-Egypt: Prospect of a New Alliance? [daring] tersedia dalam: <http://iranprimer.usip.org/discussion/2013/jan/11/iran-egypt-prospects-new-alliance> diakses pada: 01-08-2017

Sadjad, Rhiza S. *kebangkitan, Masyarakat Sipil Kelas Menengah* (daring), tersedia dalam: http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwah-lokal/Arab_Spring.pdf (diakses pada 02 Mei 2017)

Segal, Arik. *Egypt Uprising: Implications for Regional Security*. (daring) tersedia dalam: www.culturaldiplomacy.org, (diakses pada tanggal 19 Mei 2017).

Yeranian, Edward. Egypt's Morsi: Israeli Airstrikes on Gaza 'Unacceptable'. [daring] tersedia dalam: